

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI PEMALANG



PENGADILAN NEGERI PEMALANG

JALAN PEMUDA NO.59 PEMALANG
TELP. 0284-321061, FAX. 0284-321153, 321405

<http://www.pn-pemalang.go.id> EMAIL : admin@pn-pemalang.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI PEMALANG

JALAN PEMUDA NO.59 PEMALANG

TELP. 0284-321061, FAX. 0284-321153, 321405

<http://www.pn-pemalang.go.id> EMAIL : admin@pn-pemalang.go.id

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2019. Penyusunan Laporan Tahunan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Pemalang Kelas I.B dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2018.

Laporan ini disusun sesuai dengan Outline yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019. Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Pemalang Kelas I.B selama tahun 2019, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis.

Disadari bahwa capaian pada tahun 2019 ini masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai, Pengadilan Negeri Pemalang akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi dan mengembangkan inovasi baik mendukung produktivitas internal maupun perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Pemalang ke depan. Harapan kami, kiranya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.



Pemalang, 31 Desember 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI PEMALANG,


KADARWOKO, SH., MHum.
NIP. 196807121996031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Pematang	13
A.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	13
B. Penyelesaian Perkara	30
B.1 Jumlah sisa perkara yang diputus	30
B.2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	31
B.3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	33
B.4. Jumlah perkara yang berhasil dimediasi	34
B.5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	34
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	34
C.1 Posbakum	34
C.2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	35
C.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Perkara)	35
Bab III Sumber Daya Manusia	36
A. Mutasi	38
B. Promosi.....	38
C. Pensiun	38
D. Pendidikan dan Pelatihan	39
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	40
A. Pengelolaan Keuangan	40
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	43
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	47
C.1. Implementasi <i>e-court</i> di lingkungan Pengadilan Negeri Pematang	47
C.2. Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri	

	Pemalang	48
Bab V	Peningkatan Pelayanan Publik	50
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	50
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	51
	C. Inovasi Pelayanan Publik	51
Bab VI	Pengawasan	60
	A. Internal	60
	B. Evaluasi	61
Bab VII	Penutup	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Rekomendasi	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pada tanggal 17 Mei 1963 Pengadilan Negeri Pemalang secara resmi berdiri di Pemalang dengan menempati gedung Pengadilan Negeri Pemalang di jalan Prawira No. 9 (sekarang Jl.Mochtar No. 9). Segala pemeriksaan baik perkara pidana, perdata dan cepat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pemalang. Sejalan dengan perkembangan jaman dan gerak pembangunan nasional serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Pemalang, pada tahun 1982 dibangun gedung Pengadilan Negeri Pemalang yang baru terletak di jalan Pemuda No. 59 Pemalang (dulu Jl. Pemuda No. 47 Pemalang). Berdasarkan DIP No. 98/XIII/3/81 tanggal 14 Maret 1981 anggaran 1981/1982 yang diresmikan penggunaannya oleh Bapak H. Oesman Sahidi, SH. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta pada tanggal 4 Juni 1983. Adapun wilayah Kabupaten Pemalang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga
- Sebelah Barat : Kabupaten Tegal
- Kabupaten Pemalang terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 222 Desa.

Kecamatan	Banyaknya Desa / Kelurahan	Letak Ibukota Kecamatan	
		Jarak dari Ibukota Kabupaten	Tinggi dari Permukaan Air Laut
01. M o g a	10	41	497 m
02. Warungpring	6	33	213 m
03. Pulosari	12	49	914 m
04. B e l i k	12	42	738 m
05. Watukumpul	15	57	559 m
06. B o d e h	19	24	15 m
07. Bantarbolang	17	16	34 m
08. Randudongkal	18	29	212 m

09.	Pemalang	20	3	6 m
10.	T a m a n	21	5	6 m
11.	Petarukan	20	8	8 m
12.	Ampelgading	16	21	13 m
13.	C o m a l	18	17	9 m
14.	Ulujami	18	23	6 m
	Jumlah/Total	222		

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pengadilan Negeri Pemalang Kelas I.B mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara bagi pencari keadilan atau masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Pemalang dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, dengan asas sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dengan semangat pembaharuan untuk Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung (*Court Of Excellence*) sebagaimana dirumuskan dalam cetak biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035, Pengadilan Negeri Pemalang telah berupaya mengaktualisasikan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh area) yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan;
2. Kebijakan peradilan;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan anggaran;
4. Penyelenggaraan persidangan;
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan;
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau;
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Reformasi peradilan yang telah dimulai sejak tahun 2004 yang ditandai dengan program peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung, dengan demikian maka pembinaan teknis peradilan, administrasi peradilan dan administrasi umum dilakukan dan diawasi langsung oleh Mahkamah Agung. Kemudian pada tahun 2007 yang ditandai dengan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja bagi Hakim dan Karyawan menjadikan Mahkamah Agung sebagai *pilot project* dalam program tersebut.

Dalam perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI telah menetapkan 8 area perubahan yang menjadi sasarannya, yaitu :

1. Pola pikir dan budaya kerja;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan tata laksana;
5. Penataan sumber daya manusia/aparatur;
6. Penguatan pengawasan;
7. Penguatan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemudian dilanjutkan dengan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dimana terdapat 6 area perubahan yang menjadi sasarannya, yaitu :

1. Manajemen Perubahan;
2. Pengatan Tata Laksana;
3. Penguatan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Akuntabilitas;
5. Penguatan Pengawasan;
6. Peningkatan Kualias Pelayanan;

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam Perundang-undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh Aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Sub Bagian Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Pemalang juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut, Pengadilan Negeri Pemalang telah melakukan perbaikan

di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pemalang terus giat melakukan pembenahan dan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktikkan secara konsisten, sehingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima.

Sebagai salah satu tujuan dari 8 area perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tujuan yang tidak dapat ditinggalkan untuk mengimbangi derasnya laju informasi publik yang ingin dicari oleh masyarakat utamanya pencari keadilan. Untuk itu Pengadilan Negeri Pemalang membuka akses informasi yang mudah dan murah pada saat ini sebagai salah satu tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui website Pengadilan Negeri Pemalang (www.pn-pemalang.go.id). Hal tersebut dilakukan disamping untuk memudahkan bagi pelayanan publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat juga untuk memenuhi amanat Ketua Mahkamah Agung RI dalam surat keputusannya nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang berisi tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Untuk itu Pengadilan Negeri Pemalang berkomitmen untuk dapat memberikan keterbukaan informasi sebagai upaya transparansi dan peningkatan kinerja lembaga peradilan.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian-bagian Aparatur Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Pemalang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan saling mendukung satu sama lain untuk menyediakan pelayanan standar yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan kepuasan pengguna pengadilan. Dengan harapan apa yang menjadi visi Mahkamah Agung R.I. yaitu **“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”** bisa tercapai, serta sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan yaitu membangun Bangsa dan Negara yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B. VISI DAN MISI

Pengadilan Negeri Pemalang dalam tahun 2018 memiliki komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pemalang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pemalang.

Visi Pengadilan Pemalang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PEMALANG YANG AGUNG“

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

C. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yaitu segenap pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan ramah
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Profesional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah wajar
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Pematang
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki.
14. Sesuai dengan kepantasan, dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

D. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Pematang adalah **“MANTAP”**

M = Melayani

A = Akuntabel

N = Netral

T = Transparan

A = Adil

P = Profesional

E. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri pemalang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pemalang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pemalang.

Visi Pengadilan Pemalang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PEMALANG YANG AGUNG “

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

1. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pematang Siabu

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pematang Siabu adalah Terselenggaranya penanganan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pematang Siabu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya proses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan dan menindak lanjuti hasil pelaksanaan evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung RI tanggal 12 Mei 2017 melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 933/SEK/OT.01.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017. Sehingga ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pematang Siabu sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.</p>
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>

		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$
		c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting platz</i>, sidang keliling, maupun gedung-gedung lainnya).
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$

		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

3. Program Dan Kegiatan Utama

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pemalang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Program dan Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya proses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pemalang dalam pelaksanaan program ini adalah Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tujuan dari Program ini adalah terselesaikannya penanganan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum.

4. Program Dan Kegiatan Pendukung

Untuk Program dan Kegiatan Utama ditetapkan Program dan Kegiatan Pendukung yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Kegiatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

Tujuan dari Program ini adalah Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :

Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Tujuan dari Program ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

BAB II

C. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG

A.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

A.1.1. Laporan Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019

Rekapitulasi Keadaan Perkara pidana diputus tahun 2019 diperinci berdasarkan jenis perkara, yaitu perkara pidana Biasa/Khusus, Pidana Khusus Anak, Pidana Singkat, Tindak Pidana Ringan / Cepat (Tipiring), Pidana Pra Peradilan dan Pidana lalu Lintas. Terdapat sisa tahun 2018 dan putus selama tahun 2019.

Pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah perkara masuk pada jenis perkara pidana biasa yaitu dari jumlah 208 perkara pada tahun 2018 menjadi 195 perkara pada tahun 2019. Untuk perkara pidana singkat sama yaitu tidak ada perkara masuk. Perkara pidana anak sama yaitu 4 perkara baik pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019. Perkara lalu lintas mengalami penurunan dari 37.499 perkara pada tahun 2018 menjadi 31.029 perkara di tahun 2019. Pada perkara pidana ringan/cepat jumlah perkara turun dari 116 perkara pada tahun 2018 menjadi 54 perkara di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2019 ini terdapat perkara pra peradilan yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 1 perkara.

TAHUN		JENIS PERKARA					
		BIASA	ANAK	SINGKAT	CEPAT / TIPIRING	PRA PERADILAN	LALU LINTAS
2016	SISA AWAL	24	0	0	0	0	0
	MASUK	247	13	0	267	0	26.008
	PUTUS	235	13	0	267	0	26.008
	SISA AKHIR 2016	36	0	0	0	0	0
2017	SISA AWAL	36	0	0	0	0	0
	MASUK	264	12	0	148	2	45.575
	PUTUS	265	12	0	148	2	45.575
	SISA AKHIR 2017	35	0	0	0	0	0
2018	SISA AWAL	35	0	0	0	0	0
	MASUK	208	4	0	116	0	37.499
	PUTUS	211	4	0	116	0	37.499
	SISA AKHIR 2018	32	0	0	0	0	0
2019	SISA AWAL	32	0	0	0	0	0
	MASUK	195	4	0	54	1	31.029

PUTUS	217	4	0	54	1	31.029
SISA AKHIR 2019	10	0	0	0	0	0

Tabel Rekapitulasi perkara pidana dari tahun 2016 sampai dengan 2019

Untuk perkara pidana yang dimohonkan upaya hukum di Pengadilan Negeri Pemalang cenderung mengalami penurunan. Perkara yang dimohonkan banding mengalami penurunan dari 4 perkara pada tahun 2018 menjadi 3 perkara pada tahun 2019. Perkara yang dimohonkan kasasi mengalami penurunan dari 2 perkara tahun 2018 menjadi tidak ada perkara kasasi yang masuk pada tahun 2019. Perkara upaya hukum peninjauan kembali mengalami penurunan dari 1 perkara tahun 2018 menjadi tidak ada perkara kasasi yang masuk pada tahun 2019. Sedangkan untuk upaya hukum grasi tidak ada permohonan. Berikut tabel rekapitulasi perkara pidana yang dimohonkan upaya hukum dari tahun 2016 sampai dengan 2019 :

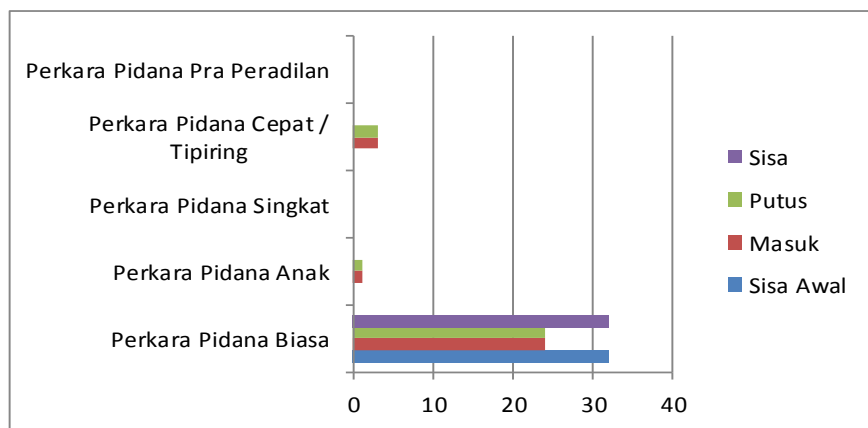
TAHUN		JENIS PERKARA			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	GRASI
2016	SISA AWAL	5	6	0	0
	MASUK	1	4	0	0
	PUTUS	5	4	0	0
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2016	1	6	0	0
2017	SISA AWAL	1	6	0	0
	MASUK	3	3	0	0
	PUTUS	4	1	0	0
	CABUT	0	1	0	0
	SISA AKHIR 2017	0	7	0	0
2018	SISA AWAL	0	7	0	0
	MASUK	4	2	1	0
	PUTUS	3	1	0	0
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2018	1	8	1	0
2019	SISA AWAL	1	8	1	0

MASUK	3	0	0	0
PUTUS	3	2	1	0
CABUT	0	0	0	0
SISA AKHIR 2019	1	6	0	0

Tabel Rekapitulasi upaya hukum perkara pidana dari tahun 2016 sampai dengan 2019

Lebih detil data per bulan keadaan perkara pidana biasa, anak, singkat, dan cepat pada Pengadilan Negeri Pematang dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2019 dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

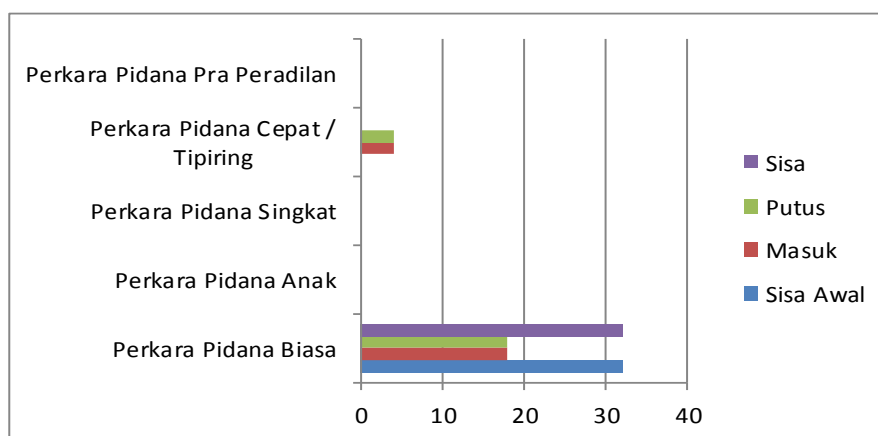
JANUARI 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	32	0	0	0	0
Masuk	24	1	0	3	0
Putus	24	1	0	3	0
Sisa	32	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan Januari 2019

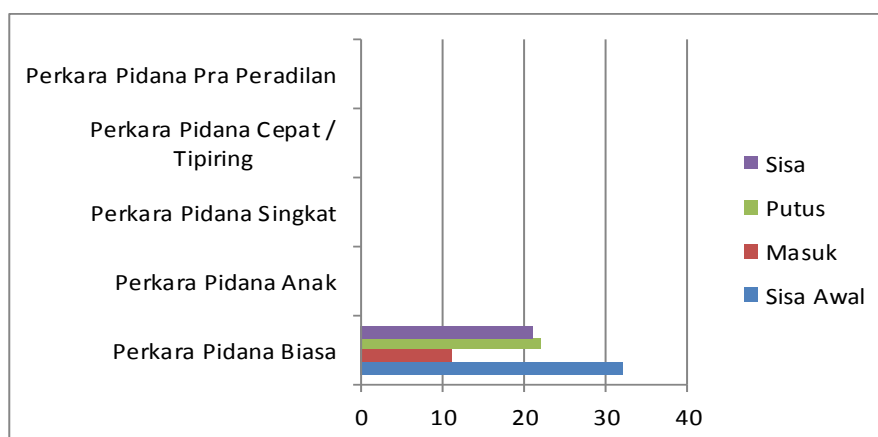
PEBRUARI 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	32	0	0	0	0
Masuk	18	0	0	4	0
Putus	18	0	0	4	0
Sisa	32	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan Pebruari 2019

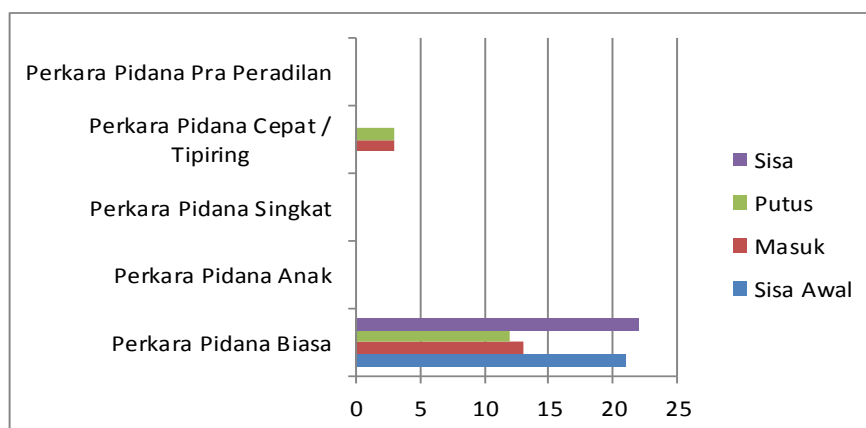
MARET 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	32	0	0	0	0
Masuk	11	0	0	0	0
Putus	22	0	0	0	0
Sisa	21	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan Maret 2019

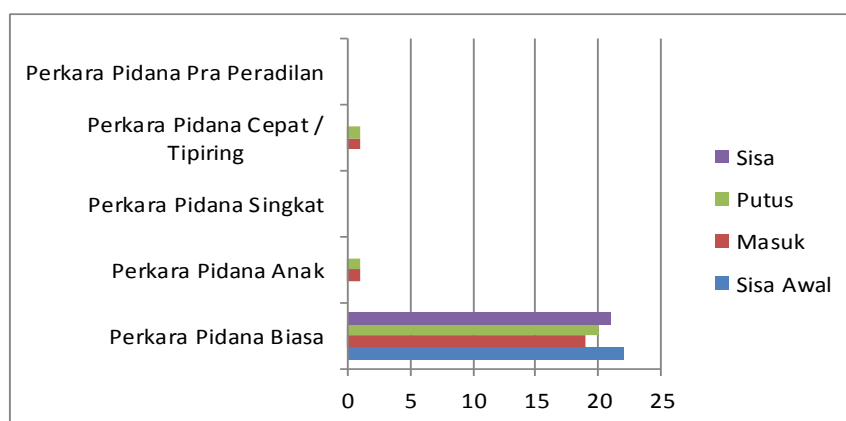
APRIL 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	21	0	0	0	0
Masuk	13	0	0	3	0
Putus	12	0	0	3	0
Sisa	22	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan April 2019

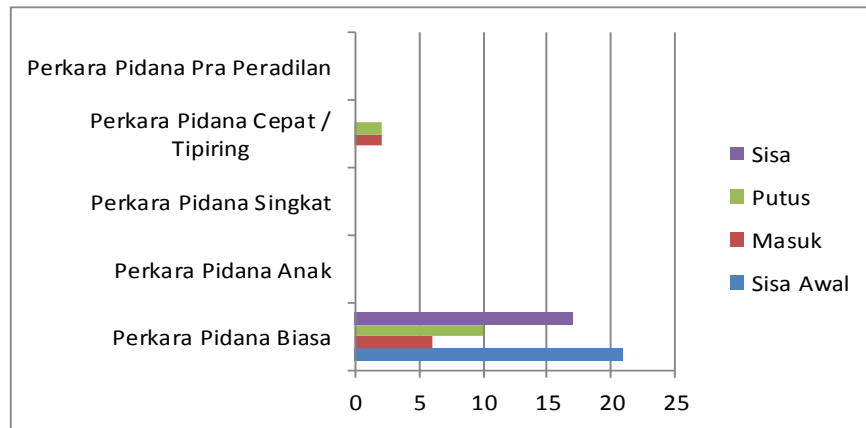
MEI 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	22	0	0	0	0
Masuk	19	1	0	1	0
Putus	20	1	0	1	0
Sisa	21	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan Mei 2019

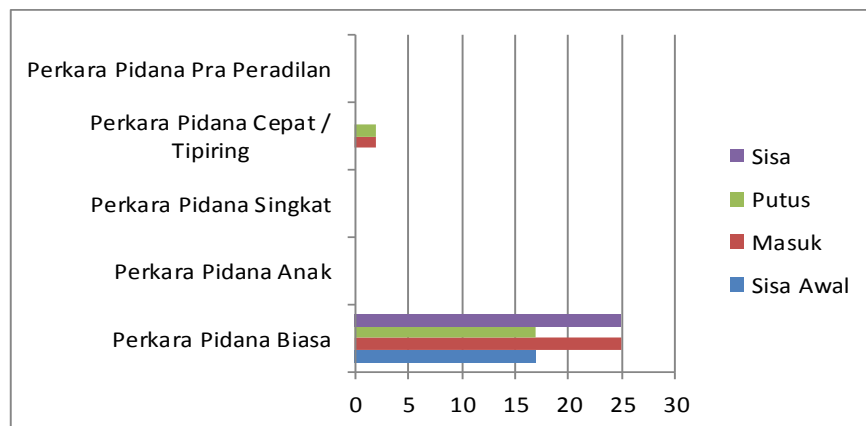
JUNI 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	21	0	0	0	0
Masuk	6	0	0	2	0
Putus	10	0	0	2	0
Sisa	17	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan Juni 2019

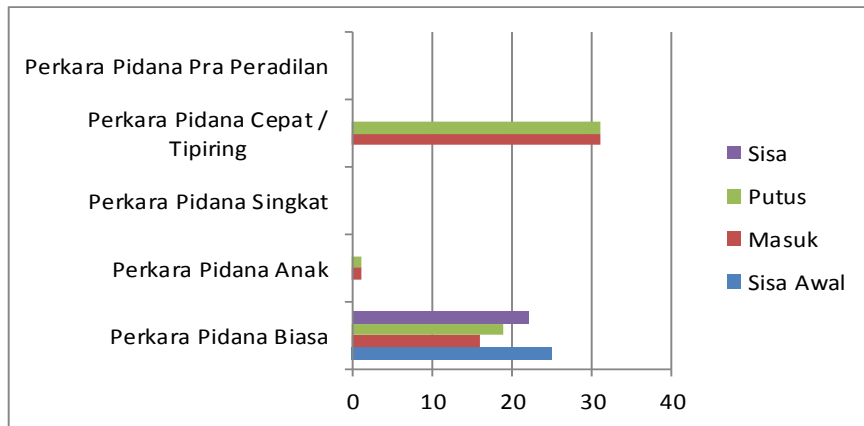
JULI 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	17	0	0	0	0
Masuk	25	0	0	2	0
Putus	17	0	0	2	0
Sisa	25	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan Juli 2019

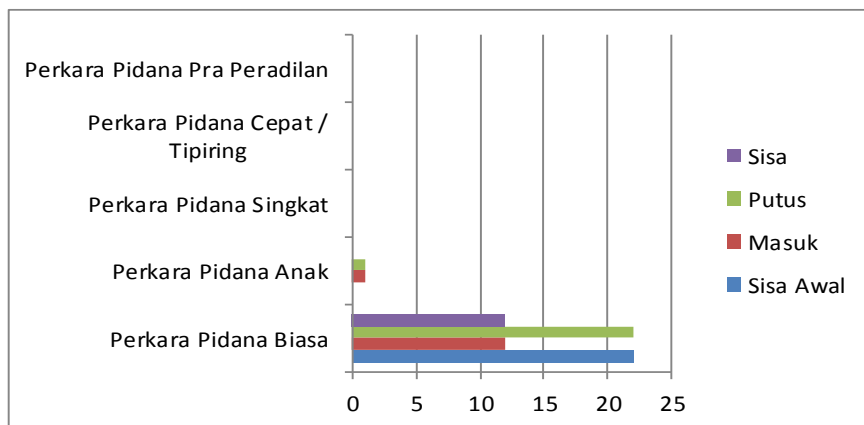
AGUSTUS 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	25	0	0	0	0
Masuk	16	1	0	31	0
Putus	19	1	0	31	0
Sisa	22	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan Agustus 2019

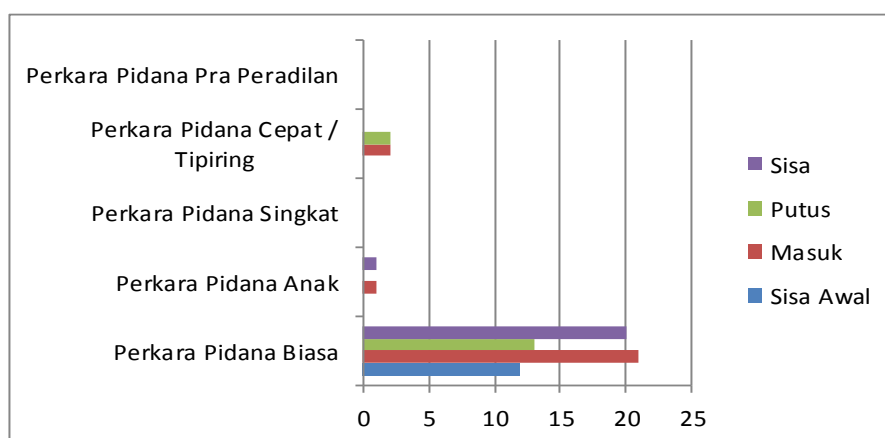
SEPTEMBER 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	22	0	0	0	0
Masuk	12	1	0	0	0
Putus	22	1	0	0	0
Sisa	12	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan September 2019

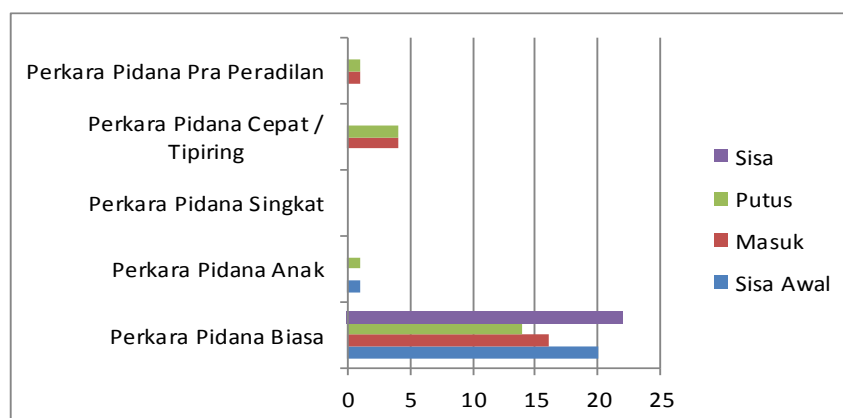
OKTOBER 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	12	0	0	0	0
Masuk	21	1	0	2	0
Putus	13	0	0	2	0
Sisa	20	1	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan Oktober 2019

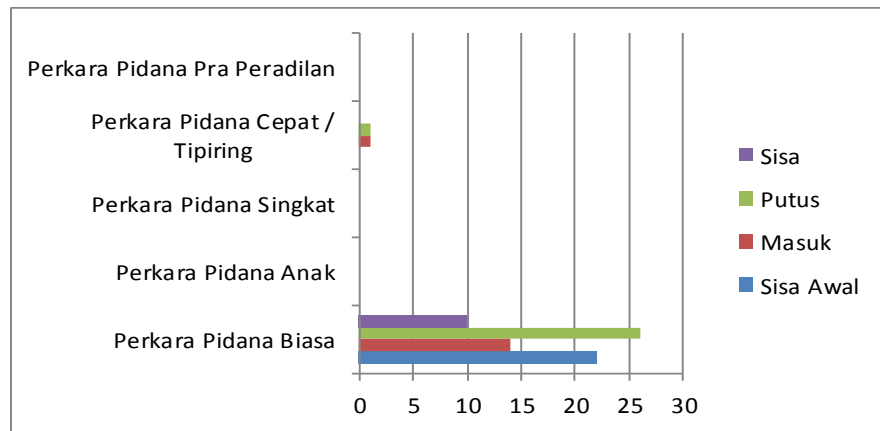
NOPEMBER 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	20	1	0	0	0
Masuk	16	0	0	4	1
Putus	14	1	0	4	1
Sisa	22	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan Nopember 2019

DESEMBER 2019



	Perkara Pidana Biasa	Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Singkat	Perkara Pidana Cepat / Tipiring	Perkara Pidana Pra Peradilan
Sisa Awal	22	0	0	0	0
Masuk	14	0	0	1	0
Putus	26	0	0	1	0
Sisa	10	0	0	0	0

Grafik keadaan perkara pidana bulan Desember 2019

A.1.2. Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019

Rekapitulasi keadaan perkara Perdata selama tahun 2019 juga diperinci berdasarkan jenis perkara yang ada dalam perkara perdata. Jenis perkara perdata dibagi menjadi 4 (empat) yaitu jenis perkara perdata Gugatan, perkara perdata Gugatan Sederhana dan jenis perkara perdata Permohonan serta perkara Bantahan. Sebagaimana perkara pidana, pelaporan rekapitulasi perkara perdata juga terdapat sisa perkara, jumlah perkara masuk dan perkara yang putus selama tahun 2019.

Terdapat perubahan jumlah perkara perdata pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 perkara gugatan yang masuk pada Pengadilan Negeri Pematang Jaya sejumlah 34, sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 47 perkara. Perkara Gugatan Sederhana terjadi kenaikan jumlah perkara masuk yang pada tahun 2018 hanya terdapat 6 perkara maka pada tahun 2019 ini terdapat 29 perkara gugatan sederhana yang masuk. Sementara untuk

perkara permohonan mengalami kenaikan yang pada tahun 2018 sejumlah 116 perkara menjadi 181 perkara masuk pada tahun 2019. Untuk perkara bantahan / perlawanan mengalami penurunan jumlah perkara masuk dari 4 perkara pada tahun 2018 menjadi 2 perkara pada tahun 2019.

TAHUN		JENIS PERKARA			
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	BANTAHAN / PERLAWANAN
2016	SISA AWAL	20	0	0	0
	MASUK	50	2	37	0
	PUTUS	41	2	33	0
	SISA AKHIR 2016	29	0	4	0
2017	SISA AWAL	29	0	4	0
	MASUK	35	2	105	7
	PUTUS	50	2	108	5
	SISA AKHIR 2017	14	0	1	2
2018	SISA AWAL	14	0	1	2
	MASUK	34	6	116	4
	PUTUS	37	6	117	5
	SISA AKHIR 2018	11	0	0	1
2019	SISA AWAL	11	0	0	1
	MASUK	47	29	181	2
	PUTUS	44	29	181	3
	SISA AKHIR 2019	14	0	0	0

Tabel Rekapitulasi perkara perdata dari tahun 2016 sampai dengan 2019

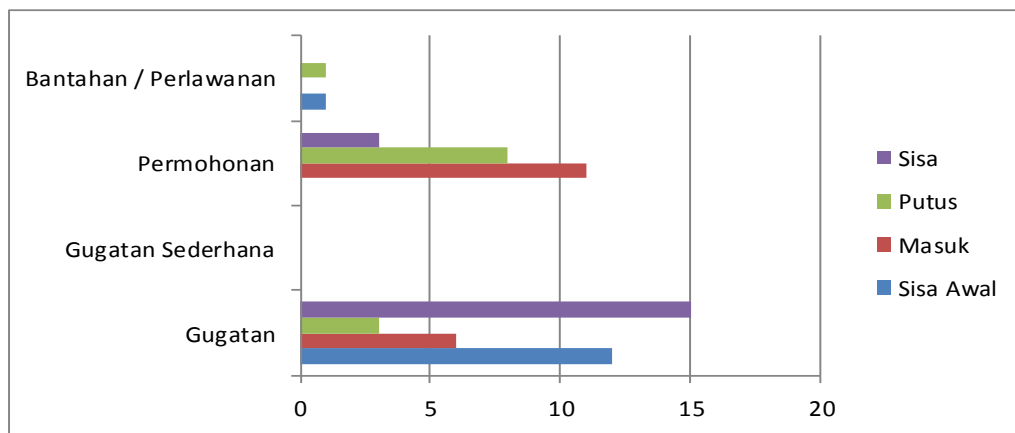
Sedangkan untuk perkara perdata yang dimohonkan upaya hukum di Pengadilan Negeri Pematang cenderung mengalami penurunan. Perkara yang dimohonkan banding mengalami penurunan dari 16 perkara pada tahun 2018 menjadi 13 perkara pada tahun 2019. Perkara yang dimohonkan kasasi mengalami penurunan dari 13 perkara tahun 2017 menjadi 9 perkara pada tahun 2019. Pada tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat perkara yang dimohonkan Peninjauan kembali. Untuk perkara eksekusi dimohonkan pada tahun 2018 sejumlah 4 perkara dan terjadi penurunan jumlah perkara eksekusi masuk tahun 2019 sejumlah 3

perkara. Berikut tabel rekapitulasi perkara perdata yang dimohonkan upaya hukum dari tahun 2016 sampai dengan 2019 :

TAHUN		JENIS PERKARA			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI
2016	SISA AWAL	5	11	5	0
	MASUK	15	9	0	3
	PUTUS	12	12	2	2
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2016	8	8	3	1
2017	SISA AWAL	8	8	3	1
	MASUK	12	10	0	5
	PUTUS	14	7	0	4
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2017	6	11	3	2
2018	SISA AWAL	6	11	3	2
	MASUK	16	13	0	4
	PUTUS	16	11	0	6
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2018	6	13	3	0
2019	SISA AWAL	6	13	3	0
	MASUK	13	9	0	3
	PUTUS	14	7	0	2
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2019	5	15	3	1

Tabel Rekapitulasi perkara perdata yang dimohonkan upaya hukum dari tahun 2016 s.d. 2019

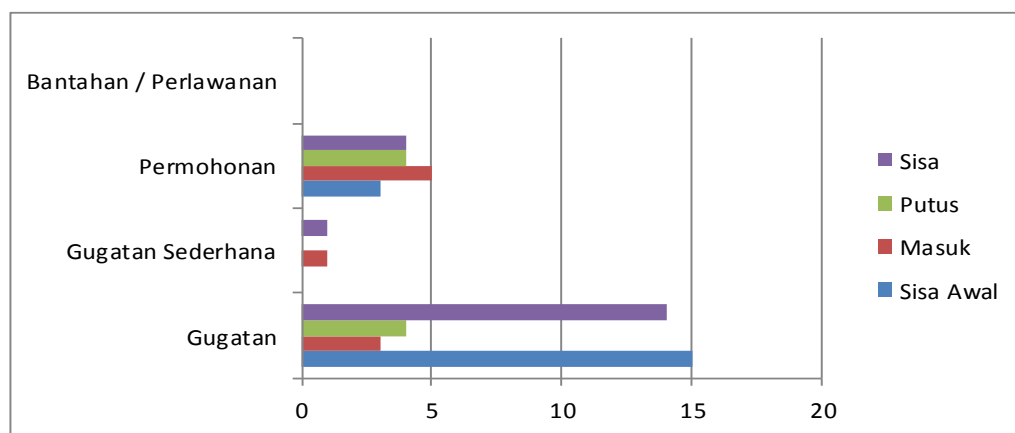
Lebih lanjut, untuk data per bulan keadaan perkara perdata gugatan, bantahan/perlawanan, gugatan sederhana, dan permohonan pada Pengadilan Negeri Pematang Jaya dalam kurung waktu satu tahun pada tahun 2019 dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan / Perlawanan
Sisa Awal	12	0	0	1
Masuk	6	0	11	0
Putus	3	0	8	1
Sisa	15	0	3	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan Januari 2019

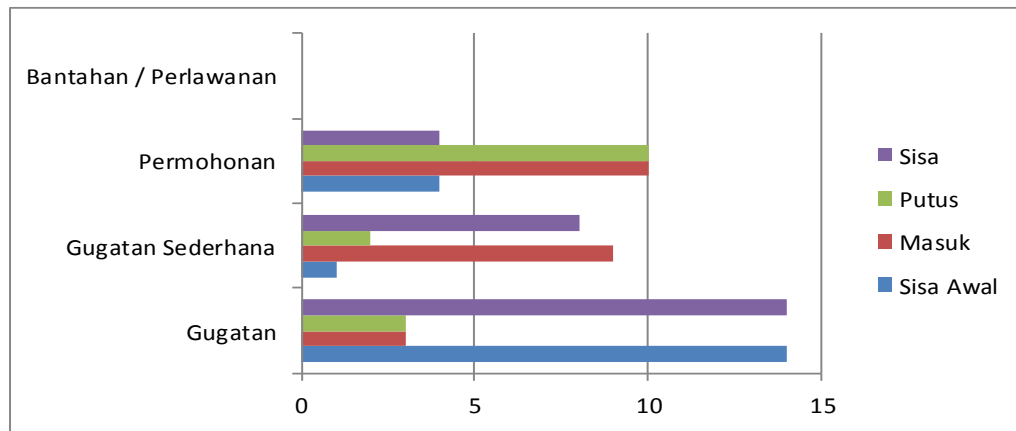
PEBRUARI 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan / Perlawanan
Sisa Awal	15	0	3	0
Masuk	3	1	5	0
Putus	4	0	4	0
Sisa	14	1	4	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan Pebruari 2019

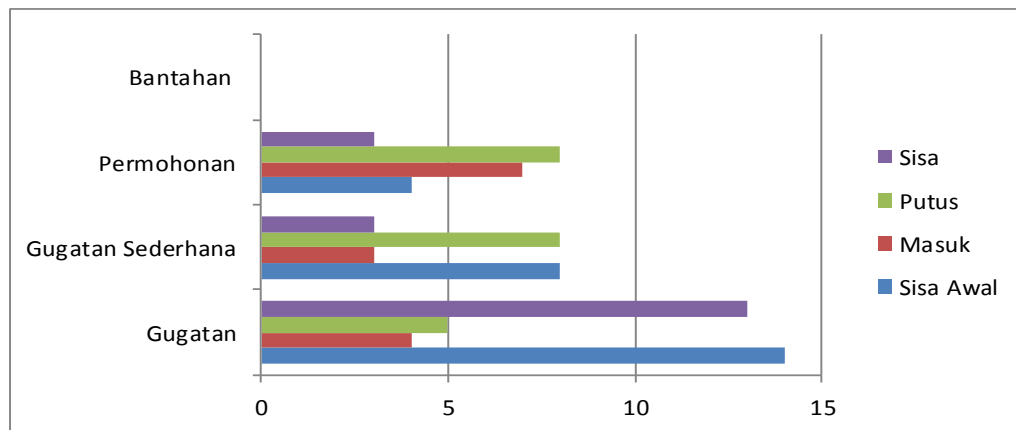
MARET 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan / Perlawanan
Sisa Awal	14	1	4	0
Masuk	3	9	10	0
Putus	3	2	10	0
Sisa	14	8	4	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan Maret 2019

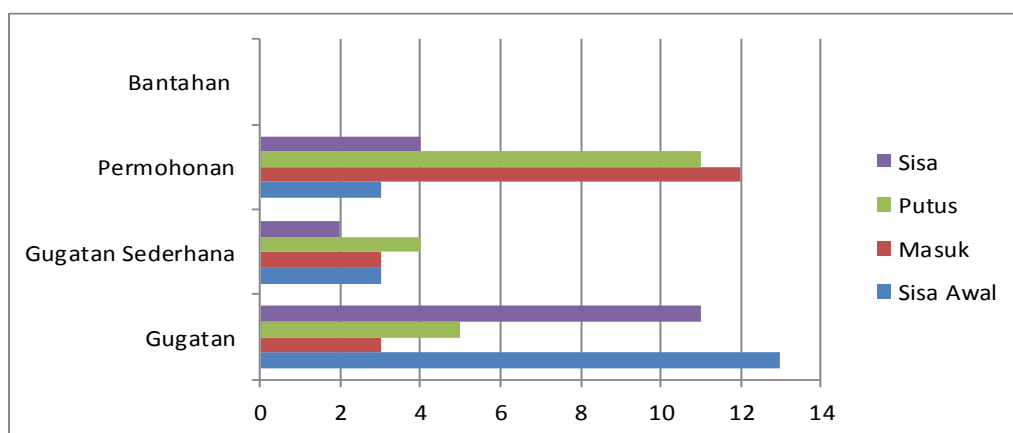
APRIL 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan
Sisa Awal	14	8	4	0
Masuk	4	3	7	0
Putus	5	8	8	0
Sisa	13	3	3	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan April 2019

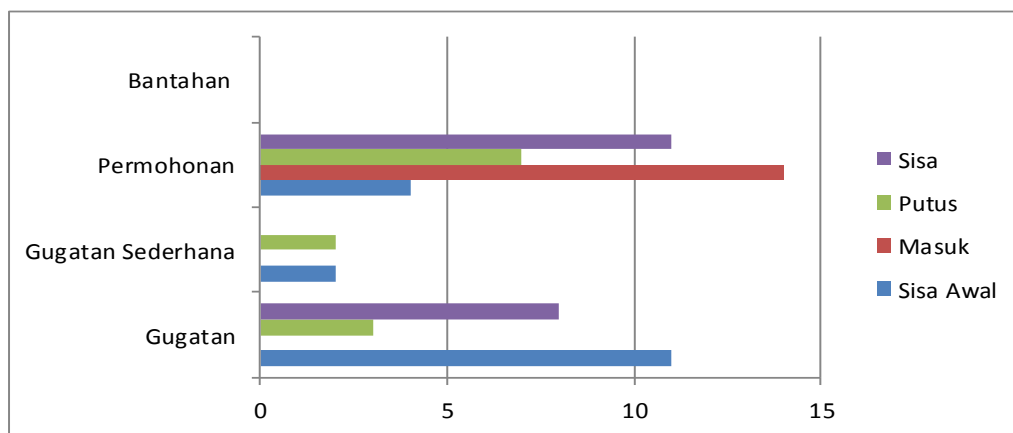
MEI 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan
Sisa Awal	13	3	3	0
Masuk	3	3	12	0
Putus	5	4	11	0
Sisa	11	2	4	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan Mei 2019

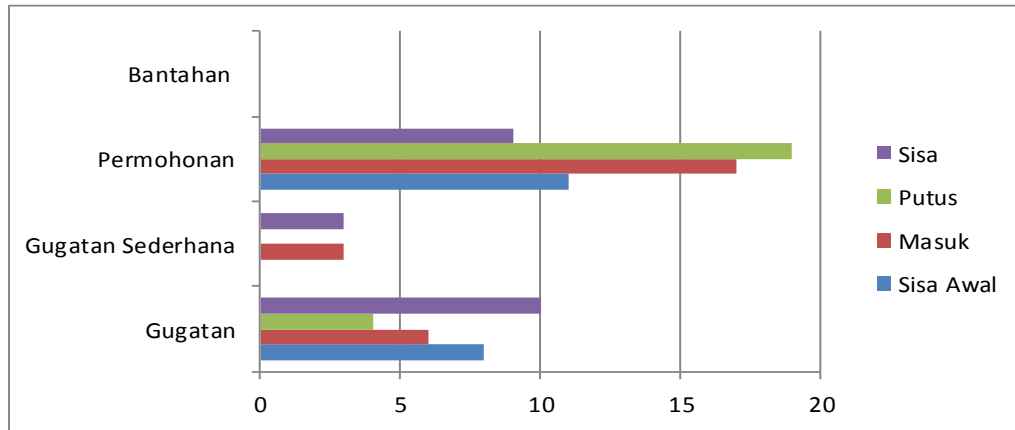
JUNI 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan
Sisa Awal	11	2	4	0
Masuk	0	0	14	0
Putus	3	2	7	0
Sisa	8	0	11	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan Juni 2019

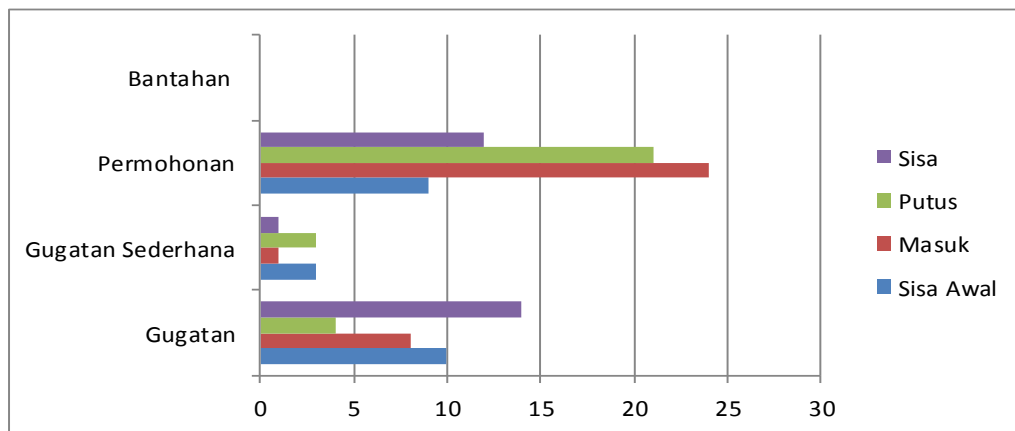
JULI 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan
Sisa Awal	8	0	11	0
Masuk	6	3	17	0
Putus	4	0	19	0
Sisa	10	3	9	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan Juli 2019

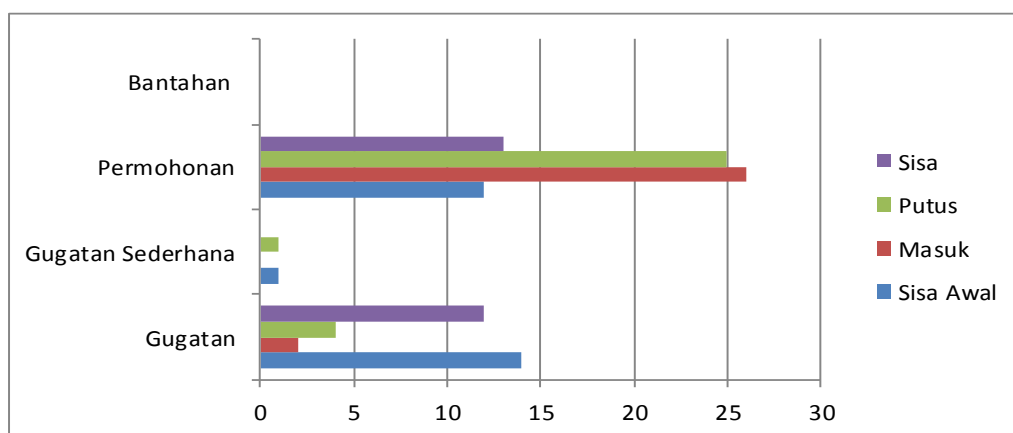
AGUSTUS 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan
Sisa Awal	10	3	9	0
Masuk	8	1	24	0
Putus	4	3	21	0
Sisa	14	1	12	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan Agustus 2019

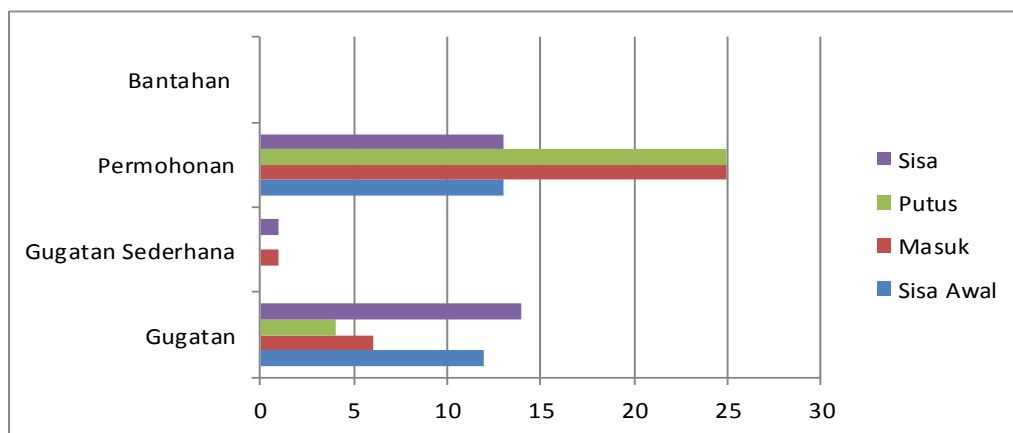
SEPTEMBER 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan
Sisa Awal	14	1	12	0
Masuk	2	0	26	0
Putus	4	1	25	0
Sisa	12	0	13	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan September 2019

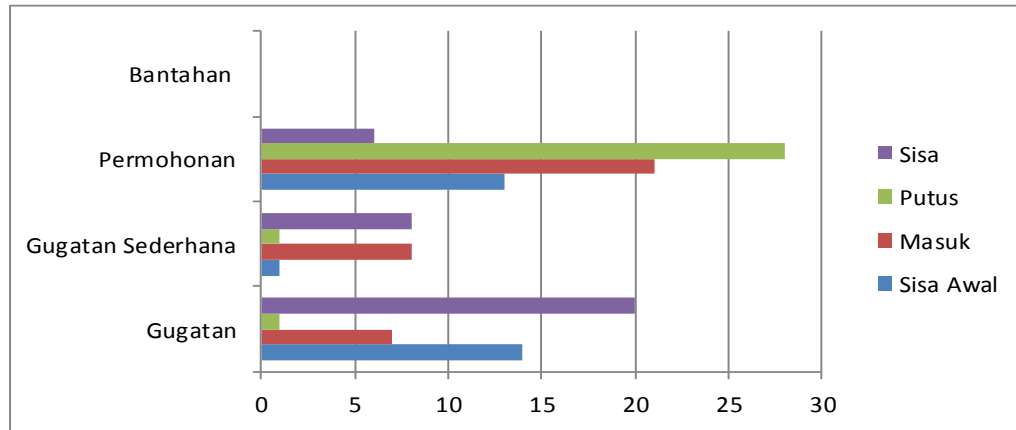
OKTOBER 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan
Sisa Awal	12	0	13	0
Masuk	6	1	25	0
Putus	4	0	25	0
Sisa	14	1	13	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan Oktober 2019

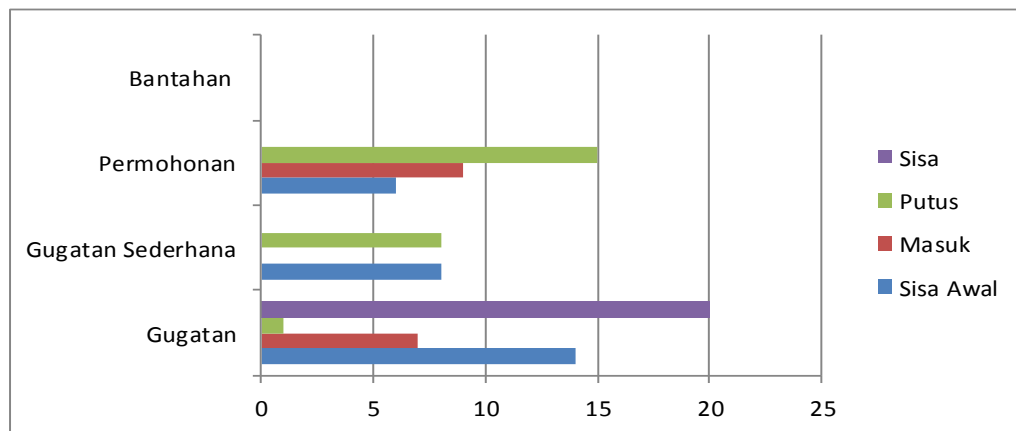
NOVEMBER 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan
Sisa Awal	14	1	13	0
Masuk	7	8	21	0
Putus	1	1	28	0
Sisa	20	8	6	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan November 2019

DESEMBER 2019



	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Bantahan
Sisa Awal	14	8	6	0
Masuk	7	0	9	0
Putus	1	8	15	0
Sisa	20	0	0	0

Grafik keadaan Perkara Perdata bulan Desember 2019

D. PENYELESAIAN PERKARA

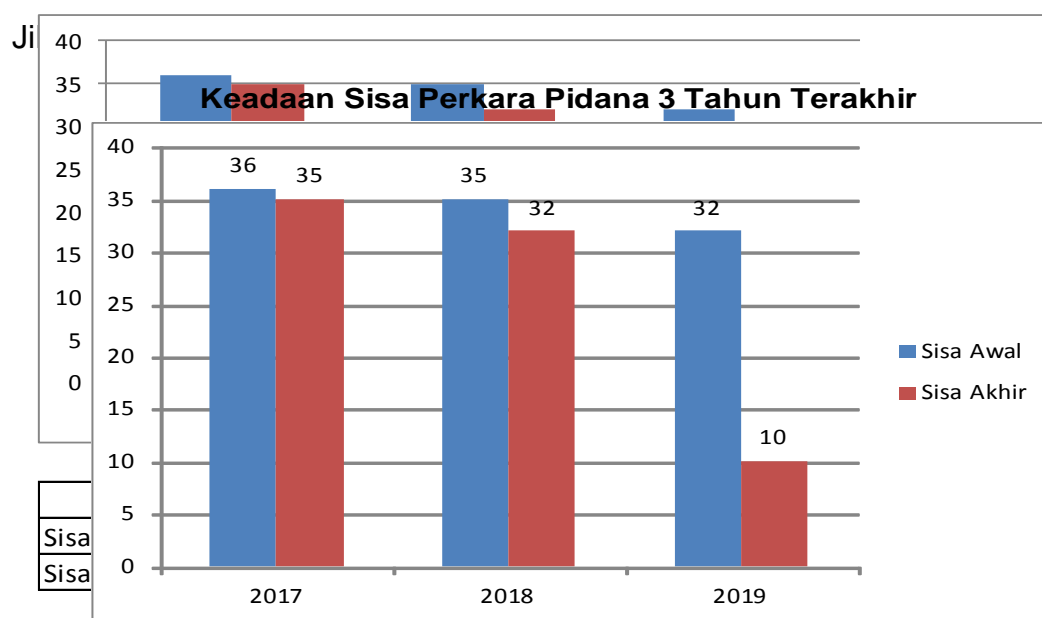
B.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Data berikut ini menyajikan perkembangan sisa perkara pada setiap akhir tahun selama tiga tahun terakhir. Target yang akan dicapai berkaitan dengan sisa perkara adalah mereduksi jumlah sisa perkara setiap tahun, yaitu dengan meningkatkan kinerja penyelesaian perkara.

❖ Perkara Pidana

Perkara	2017	2018	2019
Sisa awal tahun	36	35	32
Perkara Masuk	412	325	249
Beban perkara	448	359	281
Perkara Putus	413	327	271
Sisa Perkara	35	32	10

Keadaan Sisa Perkara Pidana 3 Tahun Terakhir



Grafik keadaan sisa perkara Pidana selama 3 tahun terakhir

Persentase penyelesaian sisa perkara pidana :

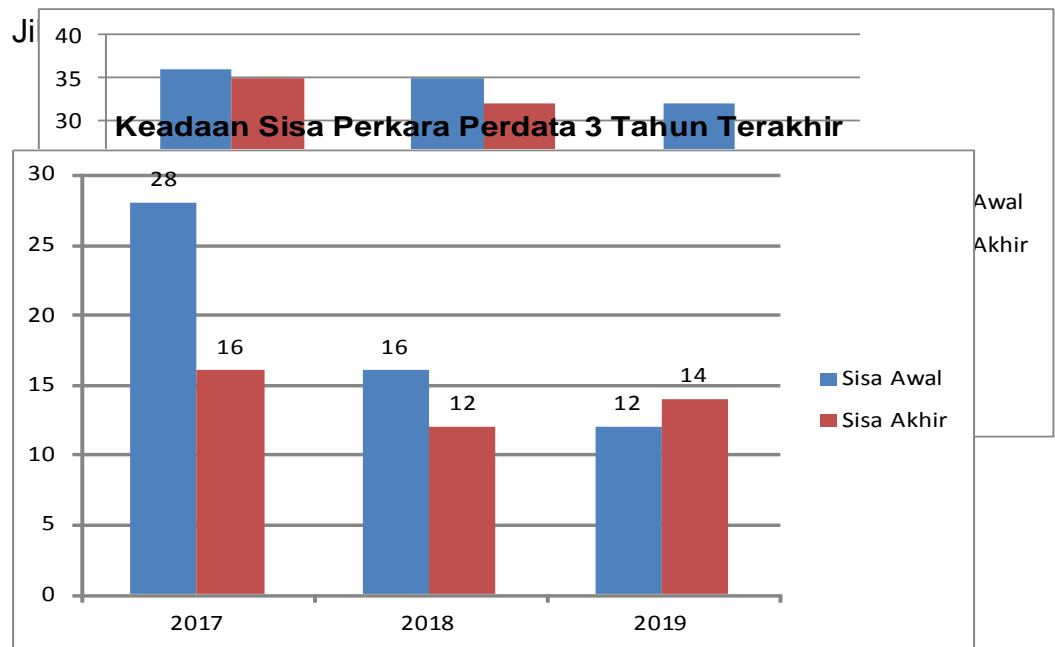
Persentase	2017	2018	2019
Persentase sisa perkara terhadap beban perkara	7,81%	8,91%	3,55%

Persentase perkara putus terhadap beban perkara	92,18%	91,08%	96,45%
--	--------	--------	--------

❖ Perkara Perdata

Perkara	2017	2018	2019
Sisa awal tahun	28	16	12
Perkara Masuk	147	152	230
Beban perkara	175	168	242
Perkara Putus	159	156	228
Sisa Perkara	16	12	14

Keadaan Sisa Perkara Pidana 3 Tahun Terakhir



Grafik keadaan sisa perkara Perdata selama 3 tahun terakhir

Persentase penyelesaian sisa perkara perdata :

Persentase	2017	2018	2019
Persentase sisa perkara terhadap beban perkara	9,14%	7,14%	5,78%
Persentase perkara putus terhadap beban perkara	90,86%	92,86%	94,21%

B.2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Penyelesaian perkara dalam hal ini adalah pengadministrasian perkara hingga selesai minutasi. Mahkamah agung telah menetapkan lama jangka waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan dari yang sebelumnya 6 bulan. Implementasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan di Pengadilan Negeri Pematang Jaya berjalan dengan lancar. Jika memang ada perkara yang belum selesai dalam jangka waktu 5 bulan maka akan ada laporan secara berjenjang dengan disertai penyebab atau alasan yang menjadikan perkara tersebut melebihi jangka waktu.

Pada tahun 2019 seluruh perkara masuk yang diputus pada Pengadilan Negeri Pematang Jaya telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 499 perkara yang terdiri dari perkara pidana sebanyak 271 perkara dan perkara perdata sebanyak 228 perkara.

Berikut adalah rekapitulasi data perkara yang melebihi jangka waktu 5 bulan tahun 2019:

❖ Perkara Pidana

No	Bulan	Jumlah perkara lebih dari 5 bulan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0

❖ Perkara Perdata

No	Bulan	Jumlah perkara lebih dari 5 bulan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0

7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0

B.3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

Indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perbandingan antara upaya hukum di Pengadilan Negeri Pematang dengan beban perkara selama tahun 2019.

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Pematang adalah sebanyak 25 perkara dari 499 perkara yang diputus pada tahun 2019.

Rincian perkara yang mengajukan upaya hukum berjumlah 25 perkara dengan rincian :

No.	Upaya Hukum	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
1.	Banding	3	13	16
2.	Kasasi	0	9	9
3.	PK	0	0	0
Jumlah				25

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum secara keseluruhan adalah dengan membandingkan antara jumlah beban upaya hukum dengan jumlah beban perkara pada tahun 2019 diperoleh angka 5,01%. Jadi dari seluruh beban

perkara tahun 2019 ada 94,99% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

B.4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Pada tahun 2019 terdapat 3 perkara yang berhasil didamaikan dalam proses mediasi, yaitu perkara nomor :

1. 17/Pdt.G/2019/PN Pml
2. 40/Pdt.G/2019/PN Pml
3. 42/Pdt.G/2019/PN Pml

B.5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2019 tidak ada perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi oleh Pengadilan Negeri Pematang Jaya.

E. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Pengadilan Negeri Pematang Jaya berupaya melakukan perubahan dan inovasi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para pengguna layanan Pengadilan Negeri Pematang Jaya dengan melaksanakan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu.

Berdasarkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung R.I. Nomor: TAPM-075/QMR/SERTIFIKAT/7/2018, Pengadilan Negeri Pematang Jaya telah memperoleh nilai A (Excelent) dalam penilaian tahap kedua Akreditasi Penjaminan Mutu dimana sebelumnya memperoleh nilai B pada penilaian tahap pertama.

C.1. Posbakum

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Pematang Jaya telah memperoleh anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sehingga sisa anggarannya Rp. 0,00 (nol rupiah).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Posbakum adalah memberikan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dan telah direalisasikan sebanyak 240 jam layanan.

C.2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Pematang telah memperoleh anggaran untuk pelayanan sidang keliling / zitting plaats sebesar Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga sisa anggarannya sebesar Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pematang adalah berupa sidang ditempat perkara pelanggaran lalu lintas dan sidang diluar gedung pengadilan berupa pemeriksaan barang bukti pada perkara pidana sebanyak 30 perkara.

C.3. Perkara Prodeo

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Pematang telah tidak memperoleh anggaran untuk pelayanan perkara prodeo.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pematang adalah berupa kerjasama dengan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan pertama perkara prodeo namun pada tahun 2019 tidak ada pihak atau para pihak yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan ini.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pemalang dengan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (Court Excellence) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Pemalang mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pemalang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf.

Berikut komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan, kepangkatan/golongan, dan pendidikan pada Pengadilan Negeri Pemalang Tahun 2019 :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	2	3	6	9	11
1	Kadarwoko, SH. M.Hum.	196807121996031000	Ketua Pengadilan	IV/b	S.2
2	Raden Ari Muladi, S.H.	196706291996031000	Wakil Ketua Pengadilan	IV/b	S.1
3	Tjahya Adi, SH.	196309131989031000	Panitera Muda	III/d	S.1

4	Rustadi, SH.	196107031985021000	Panitera Muda	III/d	S.1
5	Dwi Tjahyaningtyas, SH.	196405231994032000	Panitera Pengganti	III/d	S.1
6	Turasih, SH.	196306031985032000	Panitera Muda	III/d	S.1
7	Ratih Widayanti, SH.	198007192003122000	Hakim Tingkat Pertama	III/d	S.1
8	Sayekti Sri Harwanti,	196609241986032000	Sekretaris	III/d	SLTA
9	Siti Umamah, SHI.	197811212005022000	Panitera Pengganti	III/d	S.1
10	Siti Amdiyah, SH.	197204191994032000	Panitera Pengganti	III/d	S.1
11	Wiwin Sulistya, SH	197406122006041000	Hakim Tingkat Pertama	III/d	S.1
12	Mas Hardi Polo, S.H	198205272007041000	Hakim Tingkat Pertama	III/d	S.1
13	Susiana	196703281990032000	Panitera Pengganti	III/c	SLTA
14	Dian Jati Wiwoho, SH.	198407182009041000	Panitera Pengganti	III/c	S.1
15	Zuhdi	196604041989031000	Kepala Sub Bagian	III/c	SLTA
16	Juminah, SH	197005121992032000	Kepala Sub Bagian	III/c	S.1
17	Ribka Novita Bontong, S.H.	198111202009122000	Hakim Tingkat Pertama	III/c	S.1
18	Dwi Indiasuti, SH	197604112009122000	Staf	III/c	S.1
19	Basilio De Jesus Moniz, SH	197203061995101000	Kepala Sub Bagian	III/c	S.1
20	Tri Djoko Indarno	196607271988031000	Juru Sita Pengganti	III/b	SLTA
21	Suwono	196812051989031000	Juru Sita	III/b	SLTA
22	Endris Pramestyo	196812061993031000	Juru Sita	III/b	SLTA
23	Siti Zumaroh	197410191994032000	Juru Sita Pengganti	III/b	SLTA
24	Eko Yuliyarso	196909221993031000	Juru Sita Pengganti	III/b	SLTA
25	Wiwin Christiani, A.Md.	198207142006042000	Staf	III/b	S.1
26	Waris	196503181993031000	Juru Sita Pengganti	III/b	SLTA
27	Dewi Listiyorini, SH	197908272006042000	Staf	III/b	S.1

28	Imroatun Akromah, S.H.	199501152019032000	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S.1
29	Eko Budi Santoso, A.Md.	198305062011011000	Fungsional Umum	III/a	D.III
30	Feni Trifiana, A.Md.	198802262019032000	Pengelola Sistem Dan Jaringan	II/c	D.III
31	Heru Legowo	198501192014081000	Staf	II/b	S.1

2. Mutasi

Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) orang Pegawai Pengadilan Negeri yang beralih tugas dari Pengadilan Negeri Pemalang ke tempat lain, yaitu :

1. Rr. SARSANTI KARTIKA DEWI, SH., dari Sekretaris Pengadilan Negeri Pemalang menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Brebes.
2. AGUS YULIANTO, SE., dari Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Pemalang menjadi Staf Pengadilan Negeri Blora.

3. Promosi

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Pemalang terdapat pegawai telah diusulkan untuk dipromosikan jabatannya, yaitu :

- DIAN JATI WIWOHO, SH., jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang diusulkan untuk promosi jabatan Panitera Muda pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.

4. Pensiun

Dalam tahun 2019 ini pula terdapat 1 (satu) orang pegawai Pengadilan Negeri Pemalang yang memasuki masa pensiun, yaitu :

Bapak WINARNO, SH, jabatan Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang yang memasuki masa pensiun mulai tanggal 1 Nopember 2019.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam tahun 2019 ini pula terdapat 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Negeri Pemalang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, yaitu :

- a. Bapak Kadarwoko, SH. MHum. jabatan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang mengikuti Workshop Eksplorasi KEPPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial” di Semarang.
- b. Ibu Sayekti Sri Harwanti. jabatan Sekretaris mengikuti Diklatpim III Tahun 2019 di Bekasi.

6. Meninggal Dunia

Dalam tahun 2019 ini pula terdapat 1 (satu) orang hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang meninggal dunia, yaitu :

- Bapak WIWIN SULISTYA, SH, jabatan Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang yang meninggal pada tanggal 26 Juni 2019.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran Teknis (DIPA 03)

Realisasi Anggaran Teknis Pengadilan Negeri Pemalang (DIPA 03) dapat kami sampaikan sebagai berikut :

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa dana	
				Rp.	%	Rp.	%
	005.03.0300.099098	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	254.300.000,00	249.685.900,00	98,19	4.614.100,00	1,81
		BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	254.300.000,00	249.685.900,00	98,19	4.614.100,00	1,81
1	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	254.300.000,00	249.685.900,00	98,19	4.614.100,00	1,81
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	254.300.000,00	249.685.900,00	98,19	4.614.100,00	1,81
	005.03.07.1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.03.07.1049.003.051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.03.07.1049.003.051. A	tanpa sub komponen					
	005.03.07.1049.003.051. A.521213	Beban Honor Output Kegiatan	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.03.07.1049.003.051. A.522131	Beban Jasa Konsultan	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.03.07.1049.004	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	16.800.000,00	14.280.000,00	85,00	2.520.000,00	15,00
	005.03.07.1049.004.051	Sidang diluar Gedung Pengadilan	16.800.000,00	14.280.000,00	85,00	2.520.000,00	15,00
	005.03.07.1049.004.051. A	tanpa sub komponen					
	005.03.07.1049.004.051. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	16.800.000,00	14.280.000,00	85,00	2.520.000,00	15,00
	005.03.07.1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	213.500.000,00	211.405.900,00	99,02	2.094.100,00	0,98
	005.03.07.1049.005.051	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA	152.469.000,00	152.466.000,00	100,00	3.000,00	0,00
	005.03.07.1049.005.051. A	tanpa sub komponen					
	005.03.07.1049.005.051. A.521811		152.469.000,00	152.466.000,00	100,00	3.000,00	0,00
	005.03.07.1049.005.052	PENETAPAN HARI SIDANG	501.000,00	150.000,00	29,94	351.000,00	70,06
	005.03.07.1049.005.052. A	tanpa sub komponen					
	005.03.07.1049.005.052. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	501.000,00	150.000,00	29,94	351.000,00	70,06
	005.03.07.1049.005.053	PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN	24.330.000,00	22.218.000,00	91,32	2.112.000,00	8,68
	005.03.07.1049.005.053. A	tanpa sub komponen					
	005.03.07.1049.005.053. A.521211	Beban Bahan	22.610.000,00	21.918.000,00	96,94	692.000,00	3,06
	005.03.07.1049.005.053. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.720.000,00	300.000,00	17,44	1.420.000,00	82,56
	005.03.07.1049.005.054	MINUTASI/UPAYA HUKUM	25.300.000,00	25.973.900,00	102,66	-673.900,00	-2,66
	005.03.07.1049.005.054. A	tanpa sub komponen					
	005.03.07.1049.005.054. A.521211	Beban Bahan	25.300.000,00	25.973.900,00	102,66	-673.900,00	-2,66
	005.03.07.1049.005.055	PENGIRIMAN PETIKAN/ SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.03.07.1049.005.055. A	tanpa sub komponen					

	005.03.07.1049.005.055. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.03.07.1049.005.056	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN	7.700.000,00	8.050.000,00	104,55	-350.000,00	-4,55
	005.03.07.1049.005.056. A	tanpa sub komponen					
	005.03.07.1049.005.056. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.700.000,00	8.050.000,00	104,55	-350.000,00	-4,55
	005.03.07.1049.005.057	PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	1.100.000,00	749.000,00	68,09	351.000,00	31,91
	005.03.07.1049.005.057. A	tanpa sub komponen					
	005.03.07.1049.005.057. A.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	250.000,00	99.000,00	39,60	151.000,00	60,40
	005.03.07.1049.005.057. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	850.000,00	650.000,00	76,47	200.000,00	23,53
	005.03.07.1049.005.058	PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	1.100.000,00	799.000,00	72,64	301.000,00	27,36
	005.03.07.1049.005.058. A	tanpa sub komponen					
	005.03.07.1049.005.058. A.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	250.000,00	99.000,00	39,60	151.000,00	60,40
	005.03.07.1049.005.058. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	850.000,00	700.000,00	82,35	150.000,00	17,65

2. Realisasi Anggaran Non Teknis (DIPA 01)

Realisasi Anggaran Teknis Pengadilan Negeri Pematang Siantar (DIPA 01)

dapat kami sampaikan sebagai berikut :

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa dana	
				Rp.	%	Rp.	%
	005.01.0300.097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	4.643.926.000,00	4.547.493.266,00	97,92	96.432.734,00	2,08
		BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	21.100.000,00	21.098.000,00	99,99	2.000,00	0,01
	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.591.426.000,00	4.495.504.266,00	97,91	95.921.734,00	2,09
	005.01.01.1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	21.100.000,00	21.098.000,00	99,99	2.000,00	0,01
	005.01.01.1066.970.053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	18.100.000,00	18.098.000,00	99,99	2.000,00	0,01
	005.01.01.1066.970.053. D	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL					
	005.01.01.1066.970.053. D.524111	Beban Perjalanan Biasa	18.100.000,00	18.098.000,00	99,99	2.000,00	0,01
	005.01.01.1066.970.055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.970.055. F	PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA					
	005.01.01.1066.970.055. F.521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
		BELANJA PEGAWAI	3.665.285.000,00	3.578.537.099,00	97,63	86.747.901,00	2,37
	005.01.01.1066.994	Layanan Perkantoran	4.570.326.000,00	4.474.406.266,00	97,90	95.919.734,00	2,10
	005.01.01.1066.994.001	Gaji dan Tunjangan	3.665.285.000,00	3.578.537.099,00	97,63	86.747.901,00	2,37
	005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
	005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.645.276.000,00	1.624.448.440,00	98,73	20.827.560,00	1,27
	005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	24.000,00	22.181,00	92,42	1.819,00	7,58
	005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	106.406.000,00	105.172.906,00	98,84	1.233.094,00	1,16
	005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	33.459.000,00	32.935.344,00	98,43	523.656,00	1,57
	005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	35.420.000,00	35.420.000,00	100,00	0,00	0,00

005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.289.798.000,00	1.263.240.000,00	97,94	26.558.000,00	2,06
005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPH PNS	147.226.000,00	147.209.868,00	99,99	16.132,00	0,01
005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	74.303.000,00	72.999.360,00	98,25	1.303.640,00	1,75
005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	314.688.000,00	278.759.000,00	88,58	35.929.000,00	11,42
005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	18.685.000,00	18.330.000,00	98,10	355.000,00	1,90
	BELANJA BARANG OPERASIONAL	905.041.000,00	895.869.167,00	98,99	9.171.833,00	1,01
005.01.01.1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	905.041.000,00	895.869.167,00	98,99	9.171.833,00	1,01
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	262.200.000,00	262.200.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.01.1066.994.002. A.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	4.029.000,00	815.000,00	20,23	3.214.000,00	79,77
005.01.01.1066.994.002. A.521811	Belanja Persediaan	36.258.000,00	38.008.317,00	104,83	-1.750.317,00	-4,83
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA					
005.01.01.1066.994.002. B.521111	Beban Keperluan Perkantoran	97.694.000,00	88.852.134,00	90,95	8.841.866,00	9,05
005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.440.000,00	4.307.000,00	97,00	133.000,00	3,00
005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	112.134.000,00	110.280.366,00	98,35	1.853.634,00	1,65
005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	750.000,00	1.490.422,00	198,72	-740.422,00	-98,72
005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	1.560.000,00	1.518.700,00	97,35	41.300,00	2,65
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR					
005.01.01.1066.994.002. C.521811	Belanja Persediaan	1.000.000,00	4.030.000,00	403,00	-3.030.000,00	-303,00
005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	109.418.000,00	109.398.000,00	99,98	20.000,00	0,02
005.01.01.1066.994.002. C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	35.840.000,00	35.837.388,00	99,99	2.612,00	0,01
005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133.733.000,00	136.704.561,00	102,22	-2.971.561,00	-2,22
005.01.01.1066.994.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46.440.000,00	46.260.000,00	99,61	180.000,00	0,39
005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	9.700.000,00	12.913.500,00	133,13	-3.213.500,00	-33,13
005.01.01.1066.994.002. E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN					
005.01.01.1066.994.002. E.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.335.000,00	1.270.000,00	95,13	65.000,00	4,87
005.01.01.1066.994.002. E.522151	Beban Jasa Profesi	310.000,00	300.000,00	96,77	10.000,00	3,23
005.01.01.1066.994.002. F	KONSULTASI KE TINGKAT BANDING					
005.01.01.1066.994.002. F.524111	Beban Perjalanan Biasa	41.700.000,00	41.683.779,00	99,96	16.221,00	0,04
005.01.01.1066.994.002. G	BIAYA SEWA					
005.01.01.1066.994.002. G.522141	Beban Sewa	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	100,00
	BELANJA MODAL	52.500.000,00	51.989.000,00	99,03	511.000,00	0,97
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	52.500.000,00	51.989.000,00	99,03	511.000,00	0,97
005.01.02.1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	52.500.000,00	51.989.000,00	99,03	511.000,00	0,97
005.01.02.1071.951.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	52.500.000,00	51.989.000,00	99,03	511.000,00	0,97
005.01.02.1071.951.052. A	tanpa sub komponen					
005.01.02.1071.951.052. A.532111	Belanja Peralatan dan Mesin	52.500.000,00	51.989.000,00	99,03	511.000,00	0,97

Adapun realisasi kebijaksanaan dibidang keuangan lainnya adalah sebagai penunjang tertib administrasi keuangan yang efektif dan efisien antara lain :

- a. Menyempurnakan sistem pembukuan keuangan rutin maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disesuaikan dengan petunjuk dari Kanwil Ditjen Anggaran dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- b. Mengefisienkan anggaran yang ada sehingga pembiayaan yang telah dikeluarkan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
- c. Mempertanggungjawabkan semua jenis pengeluaran uang yang harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk SPJ rutin dengan bukti pengeluaran yang ada dan menyetorkan ke Kas Negara setiap ada sisa Anggaran.
- d. Mempertanggung jawabkan dan menyetorkan pungutan pajak serta hasil penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) setiap bulan.
- e. Melakukan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Panitera/Sekretaris sebagai atasan langsung bendahara rutin dan bendahara penerima setiap tri wulan sekali dengan cara memeriksa keadaan kas dan buku kas yang dikelola oleh bendahara rutin dan bendahara penerima.
- f. Melakukan evaluasi terhadap penerimaan DIPA apabila terdapat kekurangan anggaran maka akan dijadikan acuan dalam penyusunan RKA-KL tahun berikutnya.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Negeri Pemalang terdiri dari bangunan gedung kantor permanen milik sendiri terdiri 2 (dua) lantai dan Rumah dinas Gol I type C sebanyak 7 (Tujuh) buah. Dalam tahun 2019 ini pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak terdapat pengadaan penambahan gedung ataupun untuk penambahan rumah dinas.

Pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung untuk tahun 2019 telah berjalan sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA tahun 2019 yaitu dengan pagu anggaran Rp. 109.418.000,- (serratus sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) meliputi :

- Pemeliharaan gedung kantor dan halaman : Rp. 104.713.000,-
- Pemeliharaan rumah dinas : Rp. 4.705.000,-

Dalam tahun 2019 dilaporkan bahwa pada Pengadilan Negeri Pemalang terdapat penghapusan barang/aset milik Negara yang sudah rusak berat, berupa :

1. Barang-barang inventaris kantor senilai Rp. 9.971.005,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu lima rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 906/SEK/SK/XI/2019 tanggal 7 November 2019.
2. 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 senilai Rp. 32.493.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 916/SEK/SK/XI/2019 tanggal 13 November 2019.
3. 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 senilai Rp. 1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 916/SEK/SK/XI/2019 tanggal 13 November 2019.

Dalam tahun 2019 dilaporkan bahwa pada Pengadilan Negeri Pemalang terdapat hibah masuk barang/aset milik Negara, berupa :

No.	Jenis Barang	Asal Hibah	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Printer	Rr. Sarsanti Kartika Dewi, SH.	2	1.485.000	2.970.000
2	Printer	Winarno, SH.	2	1.500.000	3.000.000
3	Scanner	Rr. Sarsanti Kartika Dewi, SH.	1	3.965.000	3.965.000
4	Sice	R. Ari Muladi, SH.	1	4.700.000	4.700.000
5	AC Split	R. Ari Muladi, SH.	3	3.500.000	10.500.000
6	AC Split	BRI Cabang Pemalang	1	6.628.000	6.628.000
7	AC Split	BRI Cabang Pemalang	1	3.260.000	3.260.000
8	Printer	BRI Cabang Pemalang	1	1.150.000	1.150.000
9	Alat Kantor Lainnya (Tulisan Akrilik)		1	9.283.902	9.283.902
Jumlah Total Hibah Tahun 2019					45.456.902

Disamping itu dalam tahun 2019 dilaporkan bahwa pada Pengadilan Negeri Pemalang terdapat transfer masuk barang/aset milik Negara dari Mahkamah Agung RI , berupa :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Server	1	84.310.000	84.310.000
2	PC Unit	4	12.187.400	48.749.600
3	UPS	4	2.534.000	10.136.000
4	Komputer Jaringan Lainnya	1	17.840.000	17.840.000
				161.035.600

Sarana dan prasarana fasilitas gedung penunjang kegiatan di Pengadilan Negeri Pematang Liris terdiri dari :

A. Kendaraan Dinas

	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Minibus Kijang Innova	2008	Baik	-	-	G-9505-D
2.	Minibus Kijang Innova	2012	Baik	-	-	G-9504-D, Pinjam pakai Pemda
3.	Minibus Honda CRV	2018	Baik	-	-	G-4-D, Pinjam pakai Pemda
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Yamaha Yupiter Z	2008	Baik	-	-	G-98-15-AD
2.	Honda Supra X125	2005	Baik	-	-	G-9839-M
3.	Honda Supra X125	2005	Baik	-	-	G-9840-M
4.	Honda Supra X125	2007	Baik	-	-	G-9879-W

C. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	Pinjaman Pemda
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	Baik	-	-	
3.	Hakim	5	Baik	-	-	
4.	Panitera	1	Baik	-	-	
5.	Sekretaris	-	-	-	-	Belum ada
6.	Hakim	1	-	-	Rusak Berat	Lokasi Desa Banjaranyar Randudongkal

Matriks Sarana / Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Liris

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	*Keterangan
1.	Ruang Ketua	1 buah	
2.	Ruang Wakil Ketua	1 buah	
3.	Ruang Hakim	1 buah	
4.	Ruang Panitera	1 buah	
5.	Ruang Sekretaris	1 buah	
6.	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1 buah	

7.	Ruang Kepaniteraan Muda Perdata	1 buah	
8.	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1 buah	
9.	Ruang Panitera Pengganti / Jurusita	1 buah	
10.	Ruang Subbag Umum dan Keuangan	1 buah	
11.	Ruang Subbag Kepegawaian, Ortala	1 buah	
12.	Ruang Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 buah	
13.	Ruang Sidang Utama (Cakra)	1 buah	
14.	Ruang Sidang II (Candra)	1 buah	
15.	Ruang Sidang Anak (Tirta)	1 buah	
16.	Ruang Teleconference	1 buah	
17.	Ruang Posbakum	1 buah	
18.	Ruang Pelayanan	1 buah	
19.	Ruang Mediasi	1 buah	
20.	Ruang Poliklinik	1 buah	
21.	Ruang Menyusui / Laktasi	1 buah	
22.	Ruang Arsip	1 buah	
23.	Ruang Tunggu Sidang Anak	1 buah	
24.	Mushola	1 buah	
II.	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran		
24.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27) inci	3 buah	
25.	Lemari besi metal	4 buah	
26.	Lemari kayu	29 buah	
27.	Filling cabinet besi	2 buah	
28.	Rambu-rambu	7 buah	
29.	Papan visul/ papan nama	41 buah	
30.	White board	1 buah	
31.	Masin absensi	1 buah	
32.	Hand metal detector	1 buah	
33.	Meja kerja kayu	119 buah	
34.	Kursi Besi/Metal	144 buah	
35.	Kursi kayu	60 buah	
36.	Sice/sofa	4 stel	
37.	Bangku panjang besi/metal	16 buah	
38.	Bangku panjang kayu	10 buah	
39.	Meja resepsionis	1 buah	
40.	Sketsel	2 buah	
41.	AC Split	17 buah	
42.	Kipas Angin	7 buah	
43.	Loudspeaker	1 unit	
44.	Sound System	1 unit	
45.	Lambang garuda pancasila	2 buah	
46.	Dispenser	1 buah	
47.	Lambang Instansi	3 buah	
48.	Facsimile	1 buah	
49.	Automatic Dispenser	2 buah	
50.	Personal computer	2 buah	
51.	Vacuum sytem	1 buah	
52.	PC Unit	28 buah	
53.	Laptop	9 buah	
54.	Printer	14 buah	
55.	Buku perpustakaan	4572 buah	
56.	Server	1 unit	
57.	Anti Virus	1 system	
58.	CCTV	1 unit	
59.	TV LED	1 unit	
60.	UPS	2 unit	
61.	Scanner	4 unit	
62.	Infocus	1 unit	
63.	Apar	5 unit	

Dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Negeri Pematang
menerima anggaran pemeliharaan sebagai berikut :

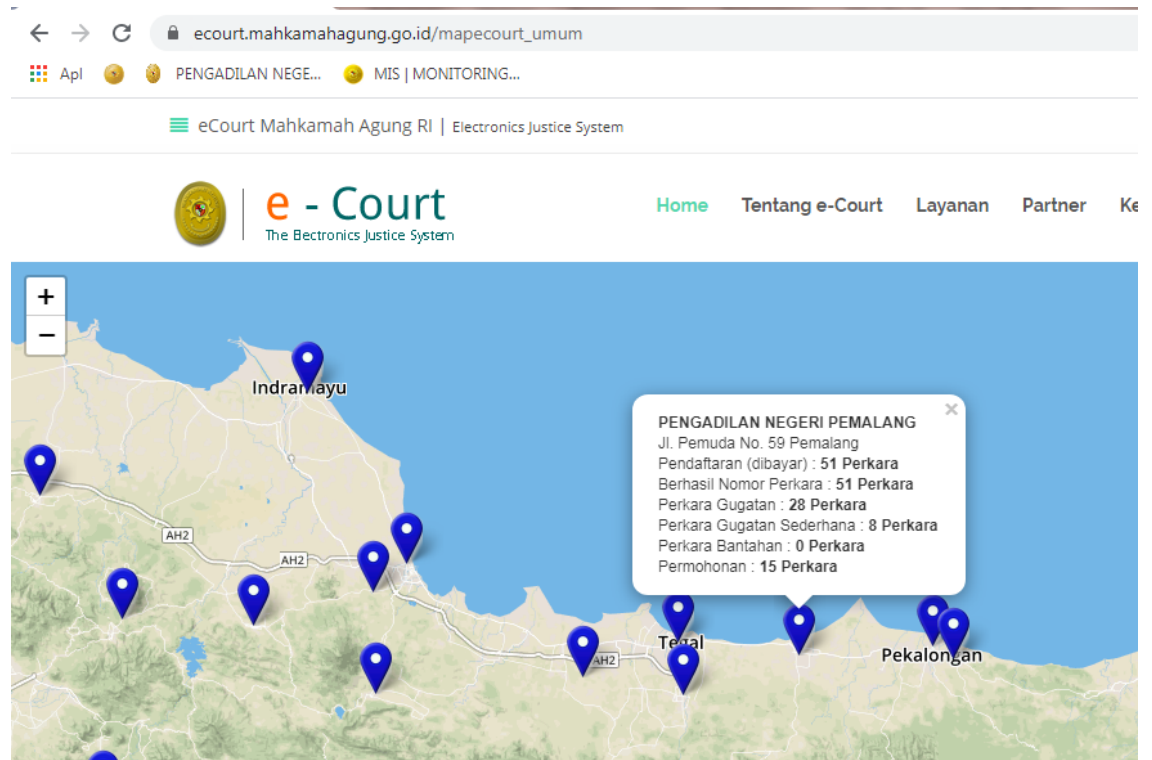
- Perawatan inventaris kantor : Rp. 36.596.000,-
- Perawatan kendaraan Roda 4 : Rp. 80.640.000,-
- Perawatan Kendaraan Roda 2 : Rp. 14.600.000,-

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Pematang dilakukan oleh seorang tenaga teknologi informasi yang kompeten dibidangnya dan berlatar belakang pendidikan D.III Informatika sehingga sejauh ini tidak ditemui kendala yang berarti. Dengan adanya tenaga IT yang hanya 2 (dua) orang maka diharapkan mampu mengelola seluruh kegiatan melalui aplikasi yang telah ada (SIPP, KOMDANAS, SIMAK-BMN, SAIBA, RKAKL, SIKEP) dengan baik dan diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal.

1. Implementasi E-Court Di Pengadilan Negeri Pematang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Pematang telah mengimplementasikan E-Court. Hal ini ditandai dengan masuknya 51 perkara melalui aplikasi E-Court sejak di *launching* hingga sekarang. 51 perkara masuk terdiri dari 28 perkara Perdata Gugatan, 8 perkara Perdata Gugatan Sederhana, dan 15 perkara Perdata Permohonan.



Gambar Peta E-Court Mahkamah Agung RI

2. Implementasi SIPP Di Pengadilan Negeri Pemalang

Hingga saat ini aplikasi SIPP telah menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pemalang. Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Pemalang selalu menyesuaikan dengan versi yang terbaru. Saat ini Aplikasi SIPP menggunakan versi 3.3.0-1.

The screenshot shows the SIPP application interface for Pengadilan Negeri Pemalang. The dashboard displays 'STATISTIK PERKARA DAN REMINDER' for December 2019. The table below provides a detailed breakdown of case statistics:

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Ekskusi	Grasi
1	Gugatan	20	1	7	700,00 %	14	2	1	-	-	-
2	Pemohonan	6	9	16	166,67 %	-	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perlawanan/Bantahan (derden vertel)	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sederhana	8	-	8	800,00 %	-	-	-	-	-	-
9	Pemohonan Konsinyasi	2	-	-	0,00 %	2	-	-	-	-	-
10	Pidana Biasa	22	14	26	185,71 %	10	1	-	-	-	-
11	Pidana Singkat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
12	Pidana Cepat	-	1	1	100,00 %	-	-	-	-	-	-
13	Perkara Lalu-Lintas	-	2089	2089	100,00 %	-	-	-	-	-	-
14	Pidana Anak	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
15	Pidana Praperadilan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

Gambar Aplikasi SIPP PN Pemalang

Dengan di-launching-nya aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP), para user SIPP di Pengadilan Negeri Pematang Jaya terbantu untuk membenarkan data pada SIPP. Aplikasi MIS ini hanya merupakan alat bantu untuk memantau kelengkapan data SIPP, juga sebagai bahan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan terkait percepatan proses penyelesaian perkara kedepan dengan tetap berpijak pada kaidah-kaidah hukum dan keadilan serta perbaikan pencatatan administrasi perkara melalui SIPP.

Teknologi Informasi yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Pematang Jaya didukung dengan sarana dan prasarana berupa :

1. Perangkat Keras :

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Server	2	Unit
2.	PC. Unit	37	Unit
3.	Laptop	12	Unit
4.	Jaringan Internet	2	Paket
5.	Printer	10	Unit
6.	UPS	6	Unit

2. Perangkat Lunak :

Perangkat lunak selain anti virus telah disediakan oleh Mahkamah Agung.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Pemalang dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari aspek Leadership, Customer Focus, Process Management, Strategic Planning, Resorces Management, Document System, Perfrmance Result. Dengan sistem penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah implementasi sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit Pengadilan Negeri Pemalang.

Dokumen dalam penjaminan mutu ini meliputi manual mutu, SOP, SK-SK KPN, dokumen SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan dokumen pendukung lainnya. Moto yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang adalah MANTAP (Melayani, Akuntabel, Netral, Transparan, Profesional).

Penjaminan mutu Pengadilan Negeri Pemalang telah dilaksanakan dengan beberapa kali penilaian terakhir oleh Tim Audit Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 21 November 2019. Dengan memperbandingkan antara konsep yang diusung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Pemalang dengan bukti-bukti implementasi / pelaksanaan kebijakan sampai di tingkat pelaksana, Tim Asesmen Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat "A Exellent" kepada Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pemalang. Sebuah pencapaian yang layak untuk tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pemalang Kelas I B.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten untuk ditempatkan di satu titik pelayanan sebagai tempat masuk dan keluarnya layanan peradilan. Sehingga masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja.



Gambar Pelayanan di PTSP

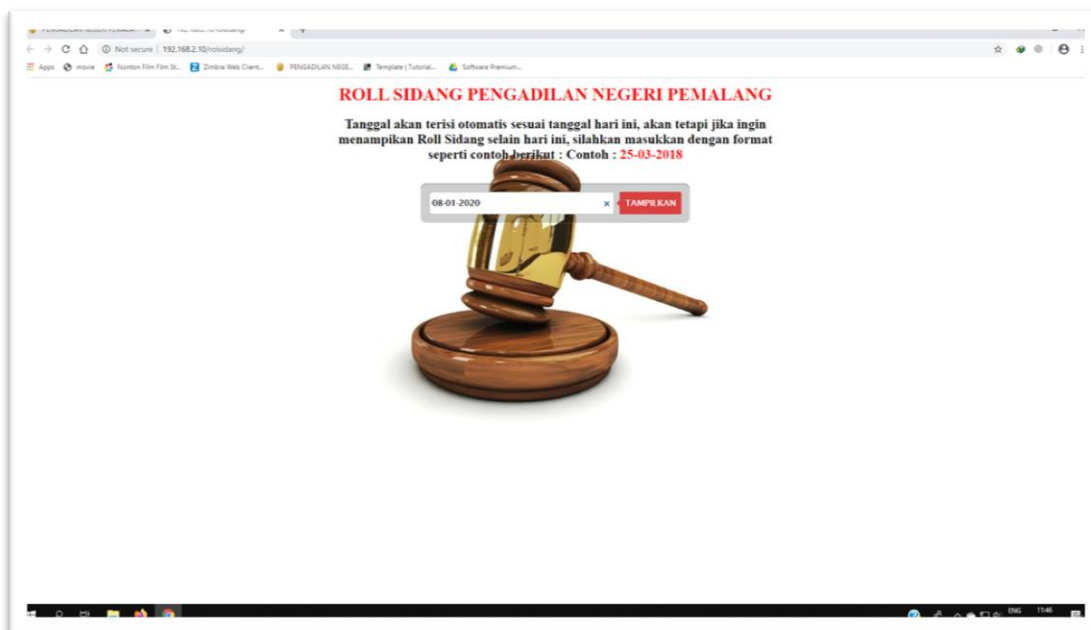
Layanan satu pintu Pengadilan Negeri Pemalang menempatkan wakil dari masing-masing kepaniteraan perdata, pidana dan hukum untuk melayani pengunjung pengadilan. Hanya saja pelayanan ini belum berjalan optimal karena sumber daya manusia yang ditugaskan adalah tenaga teknis yang juga harus menjalankan fungsi persidangan sehingga tidak bisa selalu berada di pintu pelayanan.

D. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. Antrian Panggilan Sidang

Antrian Panggilan Sidang merupakan salah satu inovasi pada Pengadilan Negeri Pemalang, aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi bagi Hakim dan Panitera Pengganti jadwal perkara yang sudah lengkap/pihak yang sudah hadir, sehingga Hakim maupun Panitera Pengganti bisa segera melaksanakan persidangan.

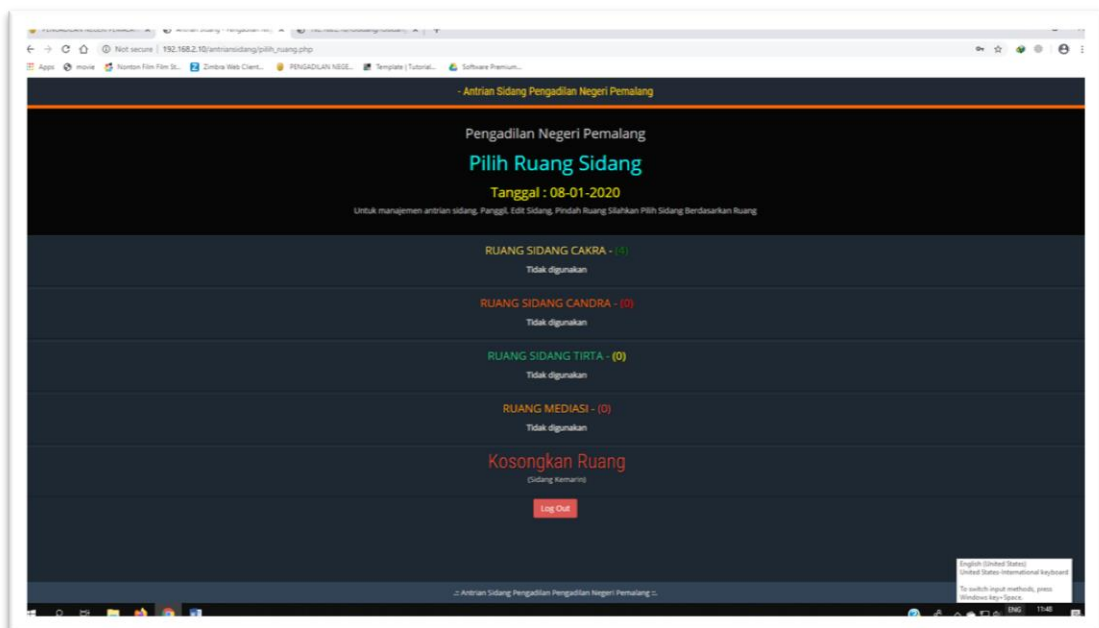
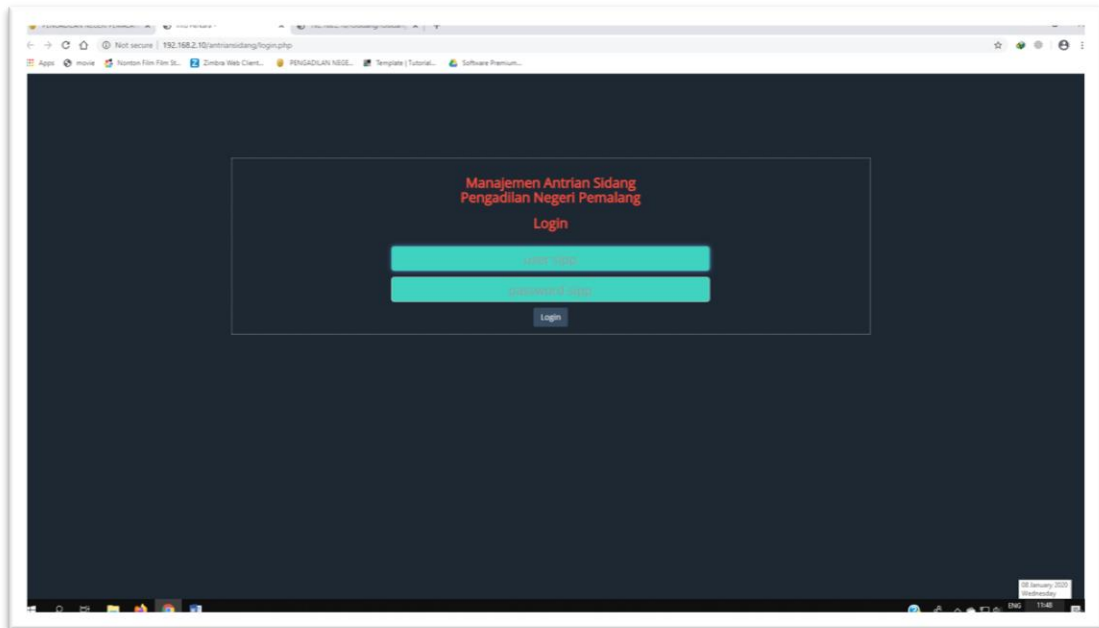
Dalam aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur panggilan bagi para Pihak yang berperkara untuk memasuki Ruang Sidang sesuai dengan nomor perkara dan Ruang Sidang.

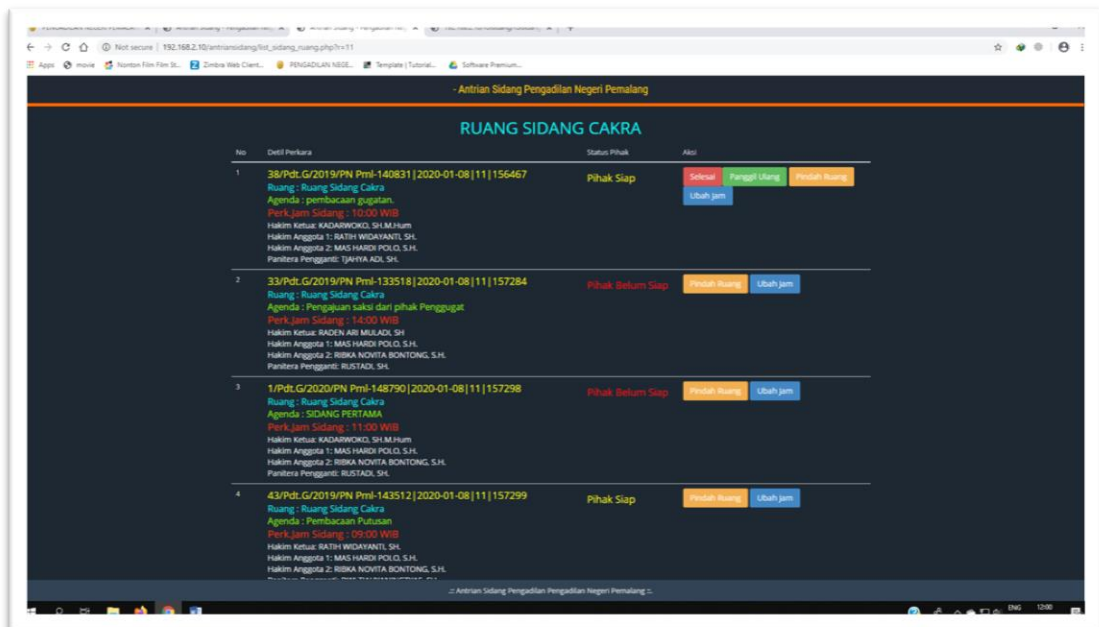
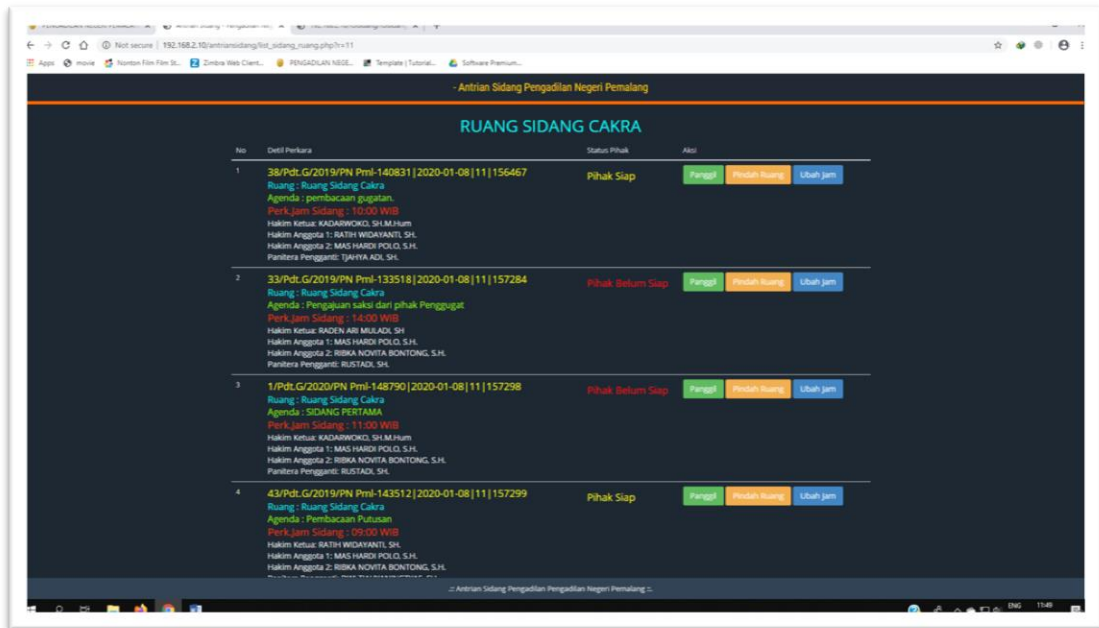


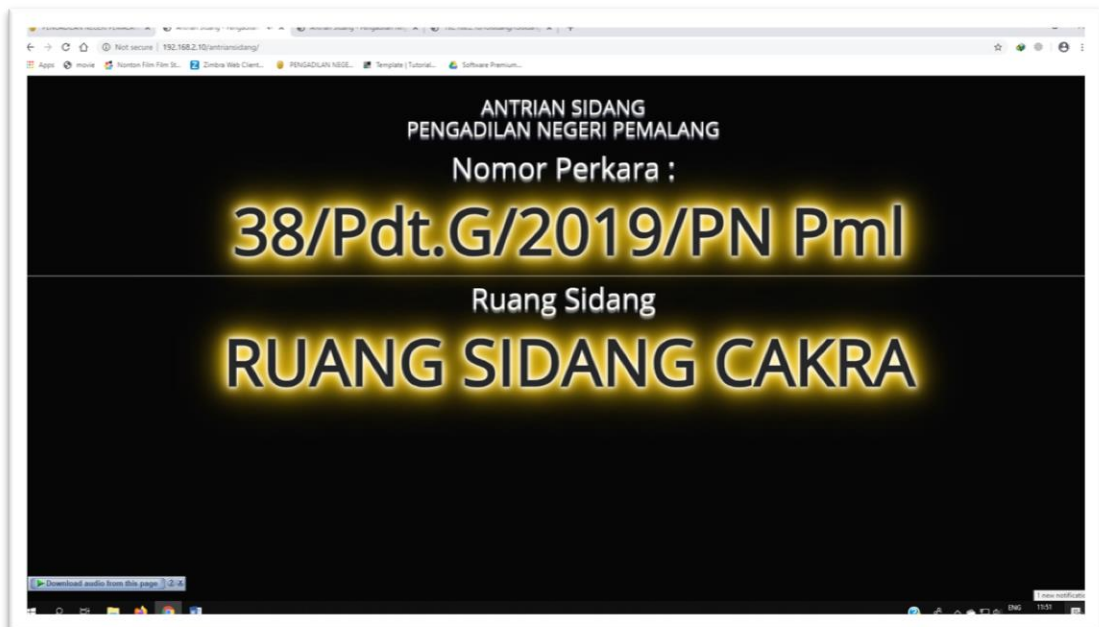
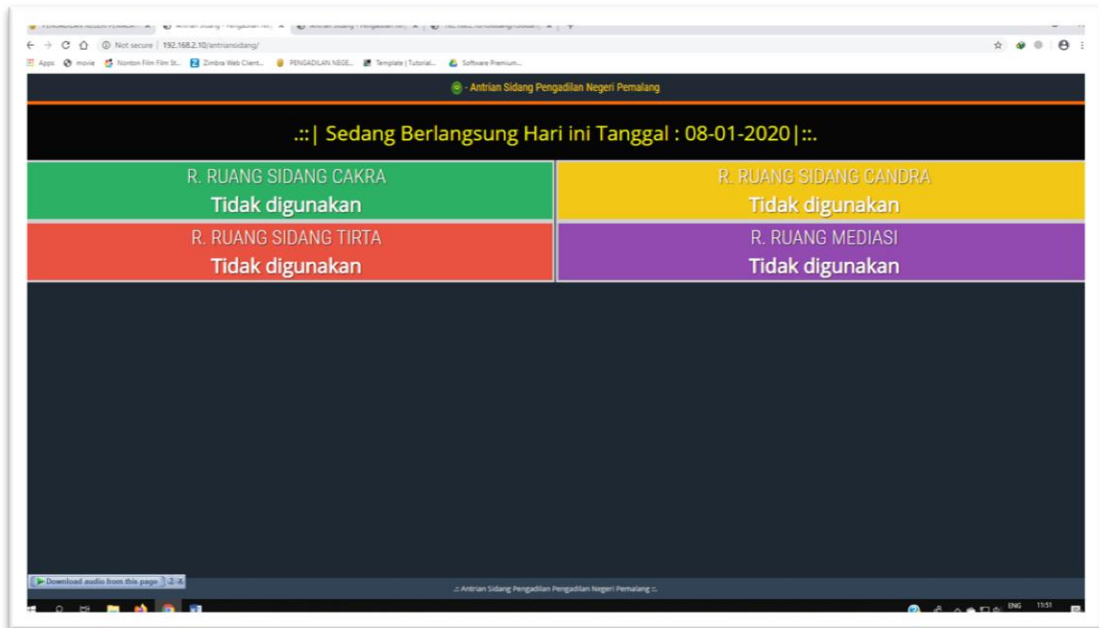
ROLL SIDANG TANGGAL 08-01-2020

Carilah bisa dengan memilihkan nomor atau lengkap untuk nomor perkara, nama pihak, pengadilan, hakim atau panitera untuk menampilkan kembali semua perkara klik cari dalam keadaan kosong

NO	Nomor Perkara	Jam Sidang	Ruang Sidang	Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Para Pihak	Edit Kehadiran	Sudah Hadir	Siap
1	36/PM.G/2019/PTN.Pem	100000	RUMAH SIDANG CAKRA	KADARWICHO BATHI WIGIRANTI, SH MASHARIF POLO	TRAFIKA AGI, SH	Penggugat: - SIGIT DARMOONO WIBOWO - TOMMY PRYLINGAN - NABIGGOLAN, S.E., S.H., M.H., dan REKAN Tergugat: - AMELIA SANTOSO - GIANG PRAMANA SETA, S.H. dan REKAN Penggugat: - HUNDAWICHI Penggugat: - RITZMA, S.H.	Edit Kehadiran	- SIGIT DARMOONO WIBOWO - TOMMY PRYLINGAN - NABIGGOLAN, S.E., S.H., M.H., dan REKAN - AMELIA SANTOSO - GIANG PRAMANA SETA, S.H. dan REKAN	<input checked="" type="checkbox"/>
2	33/PM.G/2019/PTN.Pem	140000	RUMAH SIDANG CAKRA	SADEH AMELIARIZKI MASHARIF POLO RISKA NOVITA BONTONG	BURSTAD, SH	Penggugat: - I. KETUA DPRD TINGKAT II Kabupaten Pemalang, Ck. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Pemalang, ZULHARIZKI - ZULHARIZKI - ZULHARIZKI Tergugat: - EL HABIB NURWICHYANTARI Penggugat: - IMAM SUBYANTO, SH, M.H. Tergugat: - PETRUS BUDHARISKO	Edit Kehadiran	- IMAM SUBYANTO, SH, M.H.	<input type="checkbox"/>
3	17/PM.G/2020/PTN.Pem	110000	RUMAH SIDANG CAKRA	KADARWICHO MASHARIF POLO RISKA NOVITA BONTONG	BURSTAD, SH	Penggugat: - EL HABIB NURWICHYANTARI Penggugat: - IMAM SUBYANTO, SH, M.H. Tergugat: - PETRUS BUDHARISKO	Edit Kehadiran	- IMAM SUBYANTO, SH, M.H.	<input type="checkbox"/>
4	43/PM.G/2019/PTN.Pem	090000	RUMAH SIDANG CAKRA	BATHI WIGIRANTI, SH MASHARIF POLO RISKA NOVITA BONTONG	DWI DARHANNINGSYAH, SH	Penggugat: - IVORNE MURNIASRI CHRISTIYANTI SOENJOTOMO Penggugat: - IVORNE MURNIASRI CHRISTIYANTI SOENJOTOMO Tergugat: - LUCKY DECARA	Edit Kehadiran	- IVORNE MURNIASRI CHRISTIYANTI SOENJOTOMO	<input checked="" type="checkbox"/>







2. SMS Gateway

SMS GATEWAY merupakan salah satu inovasi dari Pengadilan Negeri Pemalang yang bertujuan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam mencari informasi perkara melalui Short Message System atau SMS. Pada layanan ini mengakomodir informasi berupa Informasi Status Perkara, Informasi Jadwal Sidang, Informasi Biaya Perkara dan Informasi Denda Perkara Tilang.



Rabu, 08 Januari 2020	HOME Beranda	TENTANG PENGADILAN PN Pemalang	LAYANAN PUBLIK PN Pemalang	LAYANAN HUKUM PN Pemalang	BERITA PN Pemalang	Hubungi Kami PN Pemalang
LAYANAN HUKUM Layanan Online SMS Info Perkara						

SMS Info Perkara

SMS Info Perkara Pengadilan Negeri Pemalang tersedia dalam layanan 4 Layanan SMS yaitu SMS Info Status Perkara Perkara, SMS Info Jadwal Sidang Akan Datang, SMS Info Penguraian dan Biaya Perkara, dan SMS Info Denda Tilang.

Tidak perlu mendaftar untuk mengakses cukup mengirim SMS dengan format sebagai berikut :

info#nomor_perkara

jadwal#nomor_perkara

biaya#nomor_perkara

tilang#nomor_seri_surat_tilang

Kirim ke Nomor 0823 2930 2383

Keterangan :

Huruf besar dan kecil tidak dibermasalahkan
Pengiriman SMS dikenakan biaya regulasi sesuai operator per 1 kali kirim

Dapatkan Informasi Perkara anda selama 24 jam, hanya dengan mengirim SMS!

● Mengetahui Status Terakhir Perkara

info#nomor perkara

info#194/Pid.B/2017/PN Pml

● Mengetahui Jadwal Sidang Mendatang

jadwal#nomor perkara

jadwal#194/Pid.B/2017/PN Pml

● Mengetahui Biaya Perkara

biaya#nomor perkara

biaya#21/Pdt.G/2017/PN Pml

● Mengetahui Denda Perkara Tilang

tilang#nomor seri surat tilang

tilang#E-4988342

Kirim ke :

0823 2930 2383

Info Tilang



Akses Info Tilang Cepat dan Mudah Pengadilan Negeri Pemalang

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Publik yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Pemalang diantaranya:

- ✓ DESK INFORMATION
- ✓ PENGADUAN MASYARAKAT
- ✓ Item 3
- ✓ Item 4
- ✓ Item 5

Video PN Pemalang

Video Sosialisasi E-Court



Video Profil PN Pemalang



Video Penceranaan Zona Integritas



< +6282329302383



Senin, 30 Desember 2019

2 15:17

Info#37/Pdt.g/2019/pn pml



INFO PERKARA NO: 37/PDT.G/
2019/PN PML: Jenis Perkara :Objek
Sengketa Tanah, Tanggal Pendaftaran :
[11-10-2019](#), Pihak :[tdk dipublikasi],
Status Terakhir :Persidangan, Proses
Terakhir: Persidangan-[Detil Info Perkara,
kunjungi : <http://sipp.pn-pemalang.go.id>]-
[smscenter.PN_Pemalang]@

2 15:17

Kamis, 09 Januari 2020

2 08:13

Biaya#37/Pdt.g/2019/pn pml



Perkara No.:37/PDT.G/2019/PN PML;
Uraian : Panjar Biaya Perkara Rp.
[6026000](#)#Biaya Pendaftaran/PNBP
Rp.-[30000](#)#Biaya Pemberkasan/ATK
Rp.-[75000](#)#Biaya Panggilan Tergugat/
Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/
Pengumuman Rp.-[75000](#)#PNBP Relas
Panggilan Pertama Kepada Tergugat/
Terlawan/Pelawan Rp.-[10000](#)#Lain-lain Rp

Lihat semua >

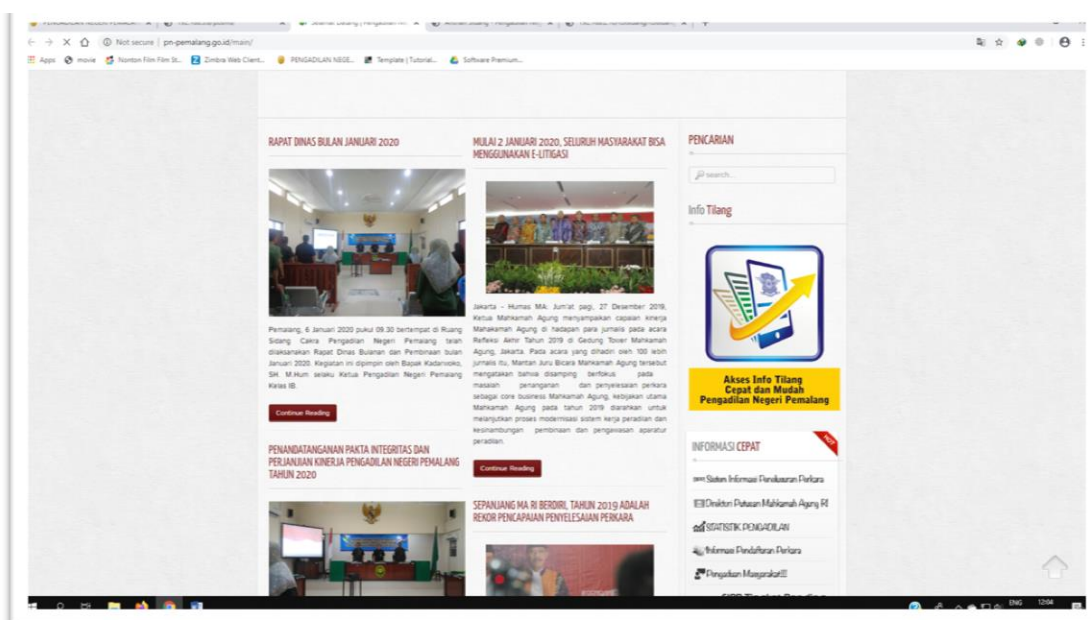
2 08:13

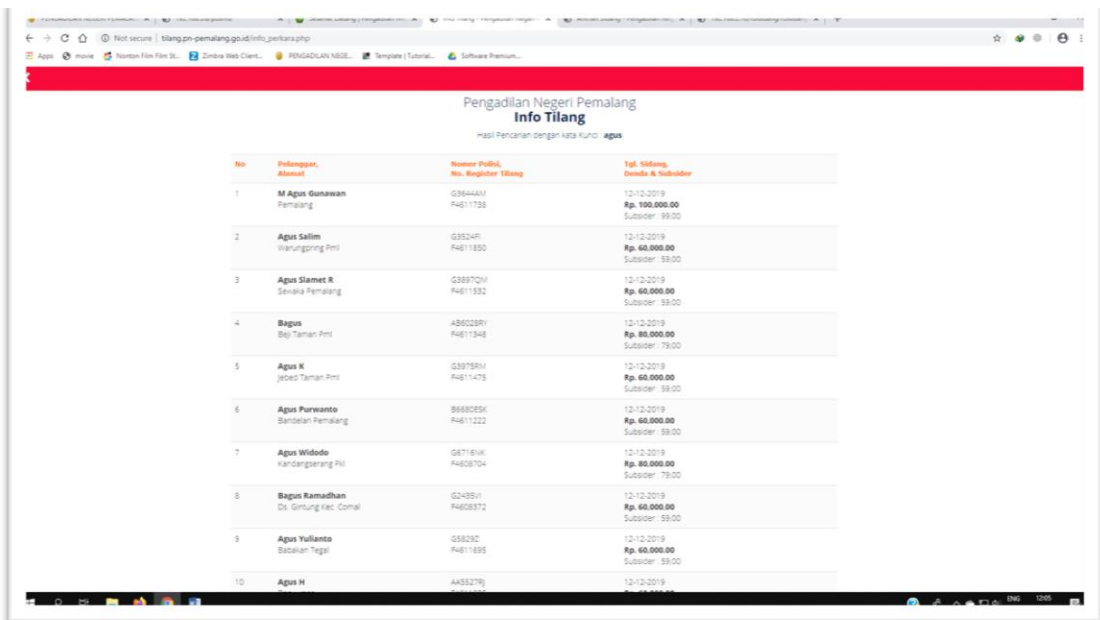
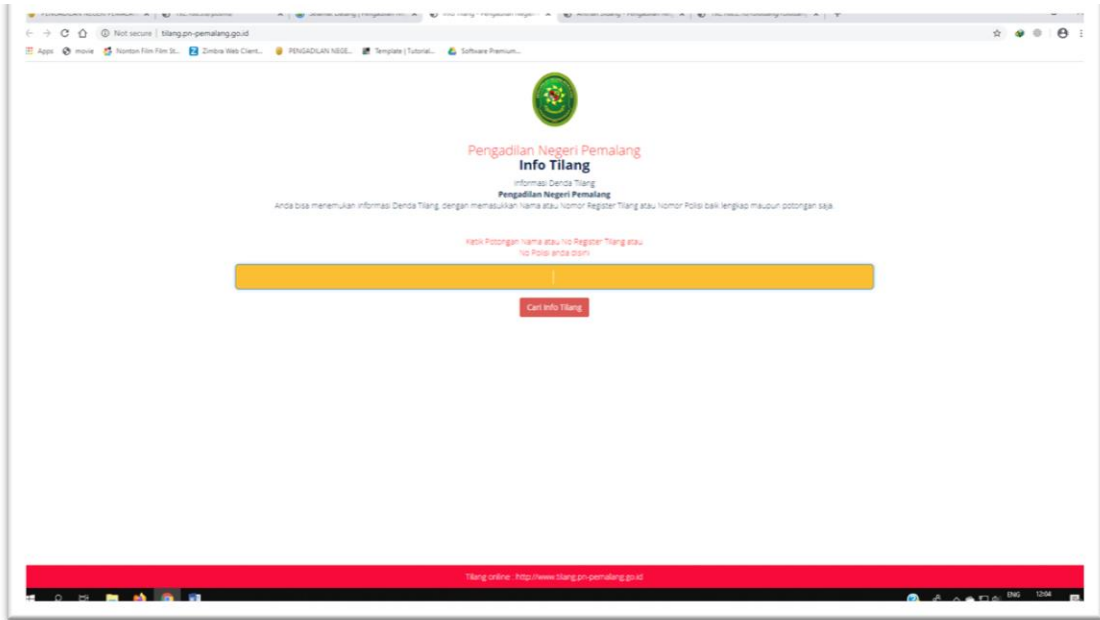
+ Masukkan pesan



3. Info Tilang Online

Info Tilang Online merupakan portal yang dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam pengecekan besaran denda tilang secara online. Data yang ditampilkan diupdate setiap hari Kamis setelah penetapan denda tilang oleh Hakim. Diharapkan dengan adanya portal Info Tilang Online ini bisa memberikan informasi yang lebih cepat kepada masyarakat berkaitan dengan besaran denda tilang, sehingga masyarakat yang akan mengambil bukti tilang bisa mempersiapkan biaya sesuai dengan denda yang telah ditetapkan. Adapun untuk mengakses Info Tilang Online ini bisa melalui website Pengadilan Negeri pemalang (www.pn-pemalang.go.id) dengan klik ikon pada Info Tilang atau langsung mengakses melalui www.tilang.pn-pemalang.go.id





BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal di Pengadilan Negeri Pematang Belit berlaku untuk seluruh Hakim dan Karyawan/Karyawati yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan tugas pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan dengan berpedoman pada :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, pasal 53 (*Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita*);
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan ;
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya ;
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 04/DJU/SE/KPOO.1/IV/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Disiplin Pegawai Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

yang kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Belit dengan membentuk Hakim Pengawas Bidang yang secara berkala memberikan laporannya dengan surat keputusan nomor : W12.U21/122/KP.07.01/7/2019, tanggal 7 Juli 2019 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Bidang Pengawasan
1	2	3	4
1.	RADEN ARI MULADI, SH. MH.	Wakil Ketua	- Koordinator Pengawas Bidang - Pengawas Bidang Perdata
2.	RATIH WIDAYANTI, SH.	Hakim Pratama Utama	Pengawas Bidang Pidana

3.	MAS HARDI POLO, SH.	Hakim Pratama Madya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Bidang Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian. - Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
4.	RIBKA NOVITA BONTONG,SH	Hakim Pratama Muda	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Bidang Hukum, - Pengawas Bidang Umum dan Keuangan,

B. EVALUASI

Evaluasi kinerja secara rutin dilakukan di Pengadilan Negeri Pematang minimal dalam satu bulan satu kali yang dilaksanakan untuk memenuhi amanat Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : SE/14/M.PAN/10/2006 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Peraturan nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2/DJU/KP.02.1/6/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Peradilan Umum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Negeri Pematang Jaya tersebut diatas jelaslah betapa kompleks tugas dan fungsi yang diamanatkan dan harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pematang Jaya sebagai ujung tombak dari Mahkamah Agung yang bertugas di daerah Kabupaten Pematang Jaya, maka tidak salah Pengadilan Negeri Pematang Jaya mempunyai misi dan tugas yang tidaklah cukup ringan. Sebab era keterbukaan ini yang penuh dengan segala tuntutan dari masyarakat yang sebelumnya dibatasi oleh kebijakan pemerintah telah dilampirkan ke segala macam permasalahan, termasuk di dalamnya permasalahan hukum yang di jaman sebelum reformasi selalu dianggap kurang begitu komitmen di dalam pelaksanaan pembangunan karakter bangsa. Untuk itu Pengadilan Negeri Pematang Jaya dalam tahun 2019 senantiasa berusaha menjalankan tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat dalam menangani permasalahan hukum yang begitu cepat dan dinamis, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila untuk dapat mewujudkan masyarakat yang tertib, disiplin dan bertanggung jawab, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.

B. REKOMENDASI

Untuk menghadapi tahun 2020 ini Pengadilan Negeri Pematang Jaya, berharap ada perbaikan dan penambahan pegawai, demikian juga penambahan fasilitas guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparatur khususnya pegawai Pengadilan Negeri Pematang Jaya yaitu :

1. Agar segera direkrut pegawai-pegawai baru yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma yang menguasai komputer dan mampu ditempatkan pada bagian kesekretariatan seperti bagian keuangan yang bertugas khusus dalam perencanaan keuangan, menyusun program dan pelaksanaan anggaran, serta operator komputer, juga pada bagian umum untuk menangani masalah buku-


buku perpustakaan, laporan SIMAK-BMN. Demikian juga bagian perkara seperti bagian pidana dan perdata dan hukum, karena selama ini banyak pejabat fungsional yang dipekerjakan sebagai staf untuk membantu tugas-tugas di bagian perkara seperti pidana, perdata dan hukum.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Pemalang kami buat, untuk menjadikan periksa dan bahan pertimbangan.

Pemalang, 31 Desember 2019



KETUA PENGADILAN NEGERI PEMALANG


KADARWOKO, SH., MHum.
NIP. 19680712 199603 1 002